

## Executive Summary

### HARMONI EMPAT AGAMA DALAM SATU DESA

(Studi Pemahaman Terhadap Nilai Pluralitas dan Toleransi Beragama di Desa Polagan  
Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)

**Suparno**

STAI Al Azhar, Menganti Gresik\_Jl. Raya Menganti Krajan No 447 Gresik

[Parnoalazhar@gmail.com](mailto:Parnoalazhar@gmail.com)

#### A. Pendahuluan

Dalam kehidupan masyarakat yang heterogen, multikultur, dan multikeyakinan, gesekan antar penganut agama atau paham keagamaan dengan berbagai dimensi kepentingan sosial-kemasyarakatan, tatanan ekonomi, struktur kekuasaan dan ideologi sosial-politik yang cenderung hegemonik seringkali menjadi persoalan yang cukup kompleks dan problematis.<sup>1</sup> Dan pada perkembangannya, fenomena agama yang menjelma dalam konteks masyarakat yang memiliki tingkat heterogenitas dan pluralitas yang tinggi, amat potensial memunculkan konflik.<sup>2</sup> Sejarah menyebutkan lahirnya konflik ini selain dipicu oleh karena adanya perbedaan keyakinan dan keragaman pemahaman terhadap doktrin-normatif (kitab suci khususnya),<sup>3</sup> juga muncul terutama ketika agama telah terkait sedemikian erat dengan kepentingan ekonomi dan politik para pemeluknya yang tidak saja melahirkan konflik intern di dalam suatu kelompok keagamaan,<sup>4</sup> bahkan yang jauh lebih besar dan sangat mengkhawatirkan adalah munculnya konflik lintas agama dan lintas kultur yang seringkali berkait-kelindan dengan persoalan sosial, politik, ekonomi, ras, gender dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Konflik antar pemeluk agama bisa terjadi, ketika kelompok yang satu merasa tidak nyaman berada atau berdampingan dengan kelompok keyakinan atau kepercayaan yang berbeda. Walaupun ada berbagai pemicu praktis dalam konflik-konflik tersebut, namun sumber yang sesungguhnya tidak lepas dari hegemoni nilai dan klaim kebenaran sepihak dari masing-masing kelompok.<sup>6</sup> Walaupun agama secara normatif, selalu mengajarkan perdamaian dan kerukunan, namun dalam fakta sosial dapat dengan mudah dilihat dari berbagai aksi kekerasan dan kerusuhan, isu agama atau paham keagamaan seringkali diikutkan dan bahkan mejadi salahsatu

---

<sup>1</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan :1998), 337.

<sup>2</sup> Syafa'atun Elmirzana, "Pluralisme, Konflik dan Dialog (Analisa dan Refleksi)", *Esensia*, 2. (Januari, 2001), 41.

<sup>3</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1997),. 6. Lihat juga dalam Komarudin Hidayat "Agama-agama Besar Dunia: Masalah Perkembangan dan Interelasi" dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (editor), *Passing Over Melintasi Batas Agama* (Jakarta: Gramedia, 1999),. 209.

<sup>4</sup> Syafa'atun Elmirzana, "Pluralisme, 41.

<sup>5</sup> Asghar Ali Engineer, "On Religious and Intercultural Dialogue," dalam <http://www.global.net.com>. lihat pula Hasan Hanafi, *Islam in The Modern World: Tradition, Revolution and Culture Vol.II* (Kairo: Dar Keba Bookshop, 2000), 557-559.

<sup>6</sup> Andre Ata Ujan dkk, *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*, (Jakarta, PT. Indeks : 2011), 110

pemicunya. Dinamika pluralitas yang kritis dan berujung pada konflik dengan mengatasnamakan atau membawa masalah agama dapat disaksikan dari berbagai tindak kekerasan yang terjadi pada akhir abad ke 20 dan awal abad ke 21. Antara lain : Kerusuhan di Situbondo pada tahun 1996, pada tahun yang sama terjadi kerusuhan serupa di Tasikmalaya, pada tahun 1997 terjadi konflik serupa di Rengasdengklok, tahun 1998 pecah insiden Ketapang yang berlanjut pada tragedi Ketapang, pada tahun yang sama pecah insiden ambon, kemudian berlanjut pada pertikaian antar agama di Halmahera dan Poso, dan pada tahun 2000 terjadi pengeboman terhadap rumah-rumah ibadah di Medan.<sup>7</sup>

Gambaran Islam Indonesia sebagai Islam yang toleran dan membedakannya dengan ciri Islam global, akhirnya menjadi terpecahkan akibat kebangkitan gerakan-gerakan keagamaan yang bercorak fundamentalis, radikalisme doktrin Islam yang disertai dengan aksi-aksi kekerasan yang sasarannya bukan hanya ditujukan kepada kelompok-kelompok agama yang berbeda, melainkan juga ditujukan kepada berbagai kelompok Muslim sendiri yang berbeda, khususnya terhadap Jamaah Ahmadiyah, Syi'ah, Salafi, dan Jaringan Islam Liberal (JIL).<sup>8</sup> Hasil survei Lembaga Studi *Center of Strategic and International Studies* (CSIS) pada tahun 2012 tentang toleransi agama di Indoonesia, menunjukkan bahwa toleransi beragama orang Indonesia tergolong rendah, walaupun masyarakat beragama siap hidup berdampingan dalam kehidupan sosial, namun ketika terkait dengan pembangunan tempat ibadah, ada kecenderungan kelompok mayoritas tidak menyetujui. Dari 2.213 responden di 23 propinsi Indonesia, 59,5 % responden tidak keberatan bertetangga dengan orang yang beda agama, sedangkan 33,7 % memilih menolak tetangga yang beda agama. Kemudian terkait dengan pembangunan tempat ibadah, 68,2 % responden memilih menolak pembangunan tempat ibadah dari agama lain, hanya 22,1 % lainnya mengaku tidak keberatan.<sup>9</sup>

Dalam penelitian Lucia Ratih Kusumadewi pada tahun 1999 di Tiga Perguruan Tinggi di Jakarta (UI, IAIN Syarif Hidayatullah, dan STF Driyarkara) tentang sikap dan toleransi beragama di kalangan mahasiswa, menunjukkan hasil bahwa sikap pluralisme di kalangan mahasiswa lebih dominan (55,8 %), sikap toleransi dikategorikan tinggi (61,7 %). Dalam sikap toleransi, dengan indikator; keinginan supaya orang lain memiliki sikap yang sama mencapai 74 %, menyikapi perpindahan agama mencapai 75 %, dan menyikapi kawin beda agama mencapai sikap toleransi yang sangat tinggi 85 %. Hal ini menunjukkan bahwa potensi toleransi di kalangan Mahasiswa sangat tinggi.<sup>10</sup>

Kemudian hasil survei yang dilakukan oleh PPIM Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2004 bersama Freedom Institute dan Jaringan Islam Liberal tentang Orientasi Sosial Politik Islam, menunjukkan bahwa : 18 % dari 1200

---

<sup>7</sup> Syahrin Harahap, *Teologi...*, 85

<sup>8</sup> M. Dawam Raharjo, *Fanatisme dan Toleransi*, dalam Irwan Masduki, *Berislam Secara Toleran Teologi Kerukunan Umat Beragama*, (Bandung, Mizan : 2011), xvi-xvii

<sup>9</sup> <http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/06/ri-becomes-more-intoleransi.html>, (14 Juni 2013)

<sup>10</sup> Lucia Ratih Kusumadewi, *Sikap dan Toleransi Beragama di Kalangan Mahasiswa; Studi di Tiga Perguruan Tinggi di Jakarta*, Skripsi, (Jakarta, FISIP-UI : 1999), 65-78

responden setuju dengan kegiatan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) seperti merazia tempat judi, dan kegiatan maksiat atau hiburan malam di Bulam Ramadhan, 15 % responden mendukung kegiatan Majelis Mujahidain Indonesia (MMI), 5 % mendukung kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam memperjuangkan diterapkannya syariat Islam, 13 % setuju dengan Jamaah Islamiyah (JI) dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang dianggap menindas umat Islam di berbagai belahan dunia, 16 % responden mendukung aksi pengeboman sebagai bentuk pembelaan terhadap Islam.<sup>11</sup> Walaupun persentase sikap intoleransi dari hasil survei tersebut rendah, namun hasil tersebut menunjukkan bahwa disintegrasi umat beragama dalam pluralitas agama dan paham keagamaan berpotensi untuk tumbuh di Indonesia.

Dalam penelitian survei yang dilaksanakan oleh Tim LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada tahun 2006 di tiga daerah (Bogor, Surakarta dan Cianjur) dengan tema Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Rawan Konflik, ditemukan hasil bahwa sebagian kalangan Muslim Indonesia masih memiliki persoalan dalam konsolidasi demokrasi. Kesiapan Muslim Indonesia untuk hidup sejajar dengan pemeluk agama lain masih rendah, misalnya dalam praktik memberi ucapan selamat kepada pemeluk agama lain yang sedang merayakan hari besar keagamaannya, hanya 15,6 % yang mendukung. Responden yang membolehkan ucapan salam (Assalamu'alaikum) kepada nonmuslim hanya 8%. Untuk praktik silaturahmi dengan nonmuslim di hari besar keagamaan mereka yang menyetujui 38,9 %, sedang praktik silaturahmi dengan nonmuslim di luar hari besar keagamaan mereka mencapai 59,9 %. Terhadap gagasan sebaiknya umat Islam hanya berteman dekat dengan orang yang sama-sama memeluk agama Islam saja, memperoleh dukungan 40,4 %..<sup>12</sup> Dari hasil penelitian LIPI ini menggambarkan bahwa sikap pluralis komunitas Muslim di Indonesia masih bermasalah.

Pada penelitian Lembaga Swadaya Masyarakat SETARA Institute pada tahun 2008 dengan jumlah responden sebanyak 800 orang dari generasi muda yang berumur 17-22 tahun dengan latar belakang agama yang heterogin. Hasil survei menunjukkan : 87,1 % responden menyatakan bahwa perbedaan agama tidak menjadi halangan dalam berteman, 67,4 % responden menerima fakta perpindahan agama.<sup>13</sup> Pada dasarnya pluralitas bangsa Indonesia yang ditandai dengan keberagaman etnis, suku, bahasa, dan agama, merupakan social capital (modal sosial) yang sangat berharga. Apabila kemajemukan atau pluralitas bangsa ini dimanfaatkan dengan baik, akan memberi keuntungan besar bagi kejayaan bangsa, tapi apabila pluralitas bangsa ini tidak dikelola secara benar, kondisi ini rentan terjadi konflik antar warga yang dapat dipicu oleh perbedaan yang ada. Konflik dan kekerasan sosial yang sering terjadi antar kelompok masyarakat, bahkan kelompok

---

<sup>11</sup> Saeful Mujani, Umat Islam Indonesia Dukung Radikalisme, (Jakarta, Harian Tempo : 12 November 2004)

<sup>12</sup> Muhammad Hisyam Ed. Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Rawan Konflik, (Jakarta, LIPI : 2006)

<sup>13</sup> Tim Penyusun, Toleransi dalam Pasungan : Pandangan Generasi Muda terhadap Masalah Kebangsaan, Pluralitas dan Kepemimpinan Nasional, (Jakarta, SETARA Institute : 2008)

keagamaan, merupakan bagian dari akibat pluralitas yang tidak dikelola secara benar.<sup>14</sup>

Paparan data riset, survei, dan pemberitaan media di atas menunjukkan bahwa adanya gejolak terpendam yang kapan saja bisa meluap menjadi kekuatan tersendiri untuk merusak keyakinan pluralitas yang tertanam di dalam individu masyarakat Indonesia. Paparan data di atas juga bisa menjadi ultimatum awal kepada kita untuk lebih sering dan intensif menyuarakan pentingnya toleransi, hidup rumpun dan rukun, serta keyakinan bahwa perbedaan budaya, ras, dan agama adalah modal sosial yang bisa menjadi kekuatan bersama dalam menjalani ragamnya polemik kehidupan, baik lokal maupun global.

Peneliti sendiri berkeyakinan bahwa Indonesia masih menyimpan banyak fakta harmoni terpendam di setiap kehidupan masyarakat, yang mungkin, jarang dieksplorasi dan dipublikasikan ke khalayak umum. Sehingga, terdapat *split of phenomena* antara yang dipahami masyarakat dengan apa yang diberitakan media masa ataupun hasil riset. Diakui atau tidak, di pilahan dusun dan desa-desa Indonesia, konflik keberagaman –khususnya antar umat beragama– sangat jarang terjadi. Kerukunan, keguyuban, dan harmoni terjalin dengan nyaman. Interaksi mereka tidak dibatasi oleh perbedaan-perbedaan terminologis yang diciptakan oleh agama masing-masing. Heterogenitas guyup dan rukun yang paling mudah dilihat adalah jalinan sosial yang terjadi setiap harinya di pasar-pasar desa atau kecamatan, di tempat wisata, di ruang publik, dan lain sebagainya.

Oleh sebab itulah, peneliti tertarik untuk mengangkat salah satu fenomena kerukunan antar umat beragama yang terjalin dengan harmoni; yakni di sebuah desa kecil bernama Desa Polagan, Pamekasan, Madura. Sebuah daerah pesisir di Pulau Madura di mana di tempat tersebut hidup dengan damai 4 (empat) agama berbeda, Islam, Hindu, Budha, dan Konghucu. Di desa ini, nilai-nilai toleransi antar penduduk dan masyarakat yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik, juga antara penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lainnya. Fenomena tersebut, menjadi semacam antimainstream dari kecenderungan masyarakat akhir-akhir ini yang menjadi semakin fundamentalis dan intoleran dalam kehidupan beragama.

Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa tempat peribadatan masing agama baik itu Agama Hindu yang berbentuk Candi, Agama Buddha yang berbentuk Pura, Agama Konghucu yang berbentuk litang atau klenteng dan Agama Islam dalam bentuk Masjid, keempat bangunan tempat peribadatan tersebut berada dalam satu lokasi dan wilayah yang sangat jarang untuk bisa ditemui di tempat-tempat lain dan semua itu berjalan dengan berdampingan dan bahkan tertata dengan rapi dan baik dalam satu kompleks.

Semua itu berlangsung sejak begitu lama, dan sepanjang sejarah, tidak pernah ada konflik yang dipicu oleh persoalan agama yang pluralistik tersebut. Sehingga menurut peneliti, persoalan ini sangat menarik untuk dikaji, diteliti dan didalami agar

---

<sup>14</sup> Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam Indonesia*, (Malang, Aditya Media Publishing : 2011), 14

dapat dijadikan bahan referensi dan tambahan pengalaman bagi para masyarakat agar nilai-nilai pluralistik dan toleransi keberagamaan masyarakat tidak lagi menjadi konflik sosial, sedangkan bagi para pengambil kebijakan yang dalam hal ini adalah pemerintah dan dinas terkait, persoalan ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan suatu kebijakan, khususnya terkait dengan persoalan pluralistik dan toleransi beragama dalam suatu kelompok masyarakat.

## **B. Pluralitas Agama dan Toleransi Beragama di Indonesia; Theoretical Framework**

### **1. Perspektif Umum tentang Pluralitas Agama**

Pluralitas (keberagaman atau perbedaan) agama adalah ketentuan *azali*, itu sudah pasti. Demikian halnya pemahaman seseorang atau kelompok terhadap pluralitas agama pun diciptakan berbeda-beda. Oleh sebab itulah, Tuhan memerintahkan manusia untuk selalu melakukan proses dialogis antar sesama, agar tetap bisa hidup berdampingan, saling menjaga, dan saling menghormati sebagai sesama ciptaan Tuhan. Kendati usaha tersebut akan sulit mencapai kesempurnaan.

Dalam diskursus masyarakat modern, cara pandang terhadap pluralitas agama dibagi-bagi menjadi tiga tipe; *pertama*, esoterisme dan ekstorisme. *Kedua*, inklusivisme dan eksklusivisme. *Ketiga*, pluralisme. Paradigma esoterisme bisa dikatakan sebagai pola pandang yang paling elitis, tidak banyak orang bisa sampai pada cara pandang ini. Harold Coward, Media Zainul Bahri, dan Sayyid Hossen Nasr, mendeskripsikan bahwa cara pandang esoterisme memiliki instrumentasi; menganggap semua agama berasal dari satu pancaran transendental, semua agama memiliki kebenaran masing-masing yang tidak bisa dinilai menggunakan cara pandang ajaran internal agama berbeda. Selain itu, para pengikut paham keagamaan ini berkeyakinan semua agama memiliki titik temu di sisi esensial dan universal.

Di dalam Islam, cara pandang esoteris bisa dilacak dari karakter umum kaum sufi, seperti Al Jilli, Ibnu Arabi, dan sufi-sufi lainnya. Melalui cara pandang demikian, maka tidak akan ada lagi konflik agama, karena semua agama berasal dari satu narasi ketentuan Tuhan. Dalam ajarannya, paham esoteris tidak sama sekali memberikan batasan tertentu untuk membenarkan agama yang satu, kemudian menilai agama yang lain salah, mereka lebih jauh dari itu, meyakini bahwa hanya Tuhan yang satu yang meleburkan seluruh kuasanya melalui agama yang diciptakan.

Sebaliknya, adapula cara pandang yang memandang bahwa semua agama memiliki perbedaan-perbedaan empirik dan antropologis; semisal dari tata cara ritual ibadah (penyembahan terhadap tuhan), keyakinan akan wujud Tuhan yang diwakilkan kepada benda yang tampak atau abstrak, dan menganggap agama yang lain 'salah' karena tidak mengikuti ajaran yang diperintahkan oleh Tuhan masing-masing, sesuai konstruksi keagamaan masing-masing. Cara pandang demikian disebut sebagai paradigma eksoterik. Imbas dari cara pandang ini, maka agama-agama yang berbeda-beda ini tidak akan memiliki titik temu. Semua agama menjalankan keyakinan masing-masing sesuai dengan ajarannya.

Terkadang, cara pandang seperti ini menumbuhkan konflik keagamaan di masyarakat.

Tipologi selanjutnya adalah inklusivisme dan eksklusivisme. Dalam pandangan penulis, dua tipologi ini merupakan penyederhanaan dari cara pandang esoteris dan eksoteris yang cenderung terlalu sulit dipahami oleh masyarakat awam. Atau bisa jadi, inklusivisme dan eksklusivisme lebih mengarah pada pengertian perilaku pengikut paham esoterisme dan eksoterisme. Alwi Shihab, menerangkan bahwa inklusivisme bermakna keterbukaan terhadap perbedaan yang terjadi di masyarakat, dari seluruh aspeknya. Sikap inklusif beragama berindikasi sikap mau menerima perbedaan agama-agama, tidak menganggap salah ajaran agama lain, berdampingan di dalam kehidupan sosial, serta tidak alergi terhadap dialog-dialog keagamaan sebagai upaya mencari titik kesamaan antara agama yang satu dengan yang lainnya.<sup>15</sup>

Dalam perspektif Islam, *inklusivisme* disamping berpijak pada pandangan *esoterisme* yang memandang adanya banyak kesatuan dalam agama-agama, *inklusivisme* juga berpijak pada kesadaran pluralitas dan humanitas sebagai pesan utama Islam dalam konteks sosial dinamis. Karena penerapan Islam – dan agama-agama lainnya - yang lepas dari konteks sosial, akan mendorong *radikalisme* dan *fundamentalisme*.<sup>16</sup> Abdul Munir Mul Khan menambahkan Islam inklusif, bertolak dari pencarian kebenaran tanpa akhir, mencintai sesama, menumbuhkan kebebasan asasi, tulus dalam pencarian kebenaran, toleran dan lapang dada dalam menyikapi perbedaan. Dengan menempatkan keagamaan sebagai wacana budaya, dan menjadikan etik shari'ah sebagai basis tindakan, sehingga islam inklusif akan selalu hadir dalam konteks sosialnya dalam damai dan harmoni. Tidak seperti islam fundamentalis yang menjadikan kebenaran eksklusif dan legal shari'ah sebagai basis tindakan, sehingga selalu ada dalam pusaran konflik dan kekerasan.<sup>17</sup>

Di pihak yang berbeda ada eksklusivisme yang mengakar pada paradigma eksoterisme. Sama halnya dengan sebelumnya, diakui atau tidak, eksklusivisme adalah buah dari cara pandang pembeda yang terkonstruksi dari eksoterisme. Dengan demikian, pendefinisianannya cukup sederhana, yakni; pola tindakan atau perilaku yang hanya membenarkan satu agama tertentu, tertutup terhadap dialog-dialog yang mengupayakan pencarian titik temu agama-agama, cenderung memaknai ajaran agama secara tekstual serta memaksa perkembangan dan perubahan zaman berkesesuaian dengan teks-teks keagamaan tertentu. Umumnya, kelompok ini memandang re-interpretasi terhadap teks suci agama sebagai bagian dari penyimpangan ajaran agama.

Pandangan eksklusivisme yang dimiliki pemeluk agama pada level keberagaman eksoterik, berimplikasi pada kecenderungan seorang pemeluk agama akan dengan mudah memberikan afirmasi terhadap kebenaran agamanya

---

<sup>15</sup> Alwi Shihab *Islam Inklusif*

<sup>16</sup> Abdul Munir Mul Khan, *Makrifat Siti Jenar Teologi Pinggiran dalam Kehidupan Wong Cilik*, (Jakarta, Grafindo Khazanah Ilmu : 2004), 126

<sup>17</sup> *Ibid*, 127

dengan cara menegasikan atau menyalahkan kebenaran agama orang lain.<sup>18</sup> Kondisi ini akan mudah menjadi sumber konflik bahkan konfrontasi antar pemeluk agama, sehingga kedamaian yang menjadi salah satu sasaran agama tidak terwujud dalam kehidupan.

Klaim kebenaran agama secara eksklusif, walaupun menjadi suatu kewajiban sebagai sarana yang diperlukan untuk menunjukkan identitas diri dalam menghadapi klaim kebenaran yang lain. Namun klaim kebenaran eksklusif ini, sering menjadi dasar dalam mengeksploitasi, dan melakukan tindakan arogan terhadap mereka yang ada di luar.<sup>19</sup> Rasionalisasi terhadap agresi, gerakan radikal yang dibungkus dengan istilah perang suci, memperoleh landasannya dalam menghegemoni mereka yang diluar dengan menggunakan baju agama dan teks-teks suci yang dipahami secara eksklusif.

Strategi penaklukan menjadi kecenderungan kelompok eksklusif dalam merespon pluralitas agama dan paham keagamaan. Berbeda dengan kelompok inklusif dan pluralis yang cenderung menghadapi pluralitas dengan strategi keterbukaan dan dialog. Bagi kelompok eksklusif, pluralitas dipandang sebagai penyimpangan, karenanya harus ditaklukkan dengan gerakan penyatuan keragaman di bawah satu pandangan agama yang dianggapnya paling benar.<sup>20</sup> Karenanya, respon eksklusivisme dapat berwujud dalam gerakan politik yang memperjuangkan suatu negara menjadi negara agama, atau ada dalam kendali sistem politik agama tertentu, bahkan dalam kondisi tertentu tidak hanya memperjuangkan sistem politik agama tertentu, lebih dari itu dikaitkan dengan paham keagamaan tertentu (misalnya dalam politik Islam dikaitkan dengan Sunni atau Syi'ah), sehingga dalam kasus terakhir, konflik tidak hanya terjadi berbasis pluralitas agama, melainkan berbasis paham keagamaan dalam intern agama.

Respon eksklusivisme terhadap pluralitas agama dan paham keagamaan, gagal dalam mengembangkan budaya dialog dan toleransi, baik dalam konteks antar agama maupun intern agama, gap antara tekstualisme dan rasionalisme, substansionalisme dan skripturalisme, fundamentalisme dan liberalisme tidak dapat dijumpai, karena dengan pandangan eksklusifnya masing-masing bertahan pada klaim kebenarannya sendiri-sendiri.<sup>21</sup> Dengan demikian eksklusivisme, tidak mampu memposisikan diri sebagai *problem-solver*, bahkan menjadi *trouble-maker* yang mendatangkan keresahan dan kegelisahan baru dalam pembentukan kehidupan beragama yang damai dan toleran. Sikap superioritas agama dan paham keagamaan, selain tidak mendapatkan legitimasi dari teks agama apa-pun,<sup>22</sup> berimplikasi pada kegagalan dalam membangun komunikasi efektif dalam kehidupan umat beragama, sehingga agama hadir bukan untuk

---

<sup>18</sup> Muhammad Sabri, *Keberagamaan Yang Saling Menyapa, Prespektif Filsafat Perennial*, (Yogyakarta, ITTAQA Press : 1999), 140

<sup>19</sup> Abdulaziz Sachedina, *Apakah Islam Membatalkan Agama Yahudi dan Kristen ? Mencari Identitas Islam pada zaman Klasik dan Modern*, dalam Ali Noer Zaman (ed), *Agama Untuk Manusia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2000), 1-2

<sup>20</sup> Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2008), 71-72

<sup>21</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Qur an Kitab Toleransi....* 198-199

<sup>22</sup> Masdar Hilmy, *Islam Profetik Substansiasi Nilai-Niali Agama Dalam Ruang Publik*, (Yogyakarta, Penerbit Kanisius : 2012), 155

menyelamatkan manusia dari kekacauan, bahkan melahirkan keresahan dan kegelisahan, serta tidak mampu membangun kehidupan beragama yang damai dan toleran.

Terakhir adalah cara pandang pluralisme; atau sikap pluralis. Pandangan penulis terhadap cara pandang ini, mungkin, lebih apresiatif dibandingkan dua pola pandangan dikotomis sebelumnya. Penulis beranggapan bahwa pluralisme hadir sebagai sikap pasrah manusia menerima kenyataan faktual yang terjadi di masyarakat. Apapun dan bagaimanapun bentuk individu, kelompok, dan habitus sosial masyarakat adalah wujud dari keberadaan yang tercipta tanpa kesengajaan manusia. Mereka memainkan pola permainan yang sudah direncanakan serta diciptakan oleh tuhan. Secara terminologis, pluralisme bisa diartikan bahwa sebuah paham kesadaran bahwa semua yang tercipta di dunia ini berbeda-beda, memiliki kebenaran yang diyakini sendiri-sendiri oleh individu, dan manusia sendiri tidak akan mampu merubahnya menjadi sebuah keseragaman. Hal yang bisa dilakukan manusia adalah membuat aturan sosial yang mampu mengakomodasi seluruh kepentingan berbeda dalam bingkai kebersamaan (*unity in diversity*).

Pluralisme, adalah sistem nilai yang menghargai pluralitas, apabila dikaitkan dengan keagamaan, pluralisme diletakkan sebagai sikap yang menghargai pluralitas keyakinan keagamaan orang lain sebagai bagian yang asasi dalam diri manusia. Pluralisme bukan *sinkritisme* agama yang mengarah pada *relativisme* yang memandang semua agama sama, sebab kalau agama dipandang sama maka dimensi pluralitasnya menjadi tidak jelas. *Pluralisme* menerima adanya perbedaan kepercayaan yang dimiliki manusia, dengan sikap saling menghargai antar penganut kepercayaan yang berbeda.<sup>23</sup> Menurut Dawam Raharjo, *Pluralisme* adalah paham yang bertolak dari realita pluralitas masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, bukan bertolak dari pemahaman bahwa yang plural itu sama, justru bertolak dari kesadaran adanya perbedaan.<sup>24</sup> *Pluralisme* hadir sebagai wahana mengatasi konflik yang berpotensi dalam pusaran pluralitas masyarakat, bukan untuk menghilangkan perbedaan menuju kesatuan bentuk, tapi untuk mendialogkan perbedaan menuju pada kesepahaman terhadap keniscayaan pluralitas.

Pandangan *Pluralisme* dalam melihat pluralitas agama diletakkan diatas pijakan bahwa agama-agama ada dalam kesatuan esensi, bersumber dari *al-Haq* dan menuju *al-Haq*. Sehingga klaim kebenaran tunggal hanya milik *al-Haq*, sedangkan klaim kebenaran yang dilakukan suatu agama tidak menafikan klaim kebenaran yang dilakukan oleh agama yang lain. Pada semua agama terdapat nilai-nilai kebenaran, dan masing-masing pemeluk agama berhak melakukan klaim kebenaran berdasarkan keyakinan dan cara pandang masing-masing dan kapasitasnya dalam menangkap *tajalli al-Haq*.

Merujuk pada firman Allah pada surat al-Maidah : 48,

---

<sup>23</sup> Budhy Munawar Rahman, *Reorientasi Pembaharuan Islam, Skularisme, Liberalisem dan Pluralisme Peradaban Baru Islam Indonesia*, (Jakarta, LSAF-Paramadina : 2010), 108-110

<sup>24</sup> M. Dawam Raharjo, *Merayakan Kenajemukan....* 184





Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, (QS : al-Maidah : 48)

KH. Husein Muhammad Penulis buku “Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan”, mengutip pendapat Imam Qatadah dalam menjelaskan makna *shir’ah* dan *minhaj* pada ayat di atas dengan pernyataan “*Al-Din wahid wa al-Syari’ah mukhtalifah*”. (Din atau agama hanyalah satu, sementara syari’at berbeda-beda).<sup>25</sup> Dan dari akhir ayat diatas, dapatlah dipahami pula bahwa pluralitas shari’at adalah kehendak Tuhan sendiri, yang dikandung maksud antara lain untuk menguji manusia dan mendorong manusia untuk berkompetisi dalam ketaatan kepada-Nya. Lebih lanjut Husein Muhammad menyatakan bahwa, pluralitas adalah sebuah keniscayaan dari kehendak Tuhan yang tidak bisa

<sup>25</sup> KH. Husein Muhammad, *Mengaji Pluralisme...*10

diingkari. Oleh karena itu, maka menjadi keniscayaan pula sikap hidup bertoleransi terhadap orang yang beda keyakinan atau agama. Penolakan terhadap pluralisme dapat dipahami sebagai penolakan terhadap keniscayaan pluralitas yang dikehendaki Tuhan sendiri.<sup>26</sup>

Di kalangan masyarakat, keberadaan cara berfikir pluralis, mungkin, tidak seideal yang dideskripsikan oleh para cendekiawan di atas. Namun, harus diakui bahwa keberadaan cara pandang pluralis sudah mengakar, karena, Negara Indonesia sudah menyelesaikan perdebatan perbedaan agama, ras, dan kebudayaan di awal-awal kemerdekaan sedang diperjuangkan. Perbincangan tentang sikap pluralis hanya mengembalikan keyakinan yang terpaat, terpendam, di dalam individu yang ada di masyarakat. Sikap pluralis, tanpa menimbulkan paham di balakang teks ini, berwujud terhadap penerimaan untuk hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda pandangan, agama, budaya dan lain sebagainya.

## 2. Dinamika Sosial Toleransi Beragama

Secara bahasa, toleransi yang dalam bahasa inggris disebut *tolerance* memiliki arti *Willingness or ability to tolerate somebody or something*, sedang kata tolerat berarti (1) *allow (something that somebody dislike or disagree) without interfering*, (2) *endure (somebody or something) without proteting*.<sup>27</sup> Dalam bahasa arab *tasamuh* (تسامح) berarti lapang dada.<sup>28</sup> Di dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaybah dan Bukhari dinyatakan *السمحة الحنيفة الله الى بن الد احب* (Agama yang paling dicintai Allah adalah ajaran yang lurus-toleran). Nurcholish Madjid memberi pemaknaan terhadap *al-h{anifiyatu al-samh{ah* dengan “semangat mencari kebenaran yang lapang, toleran, tidak sempit, tanpa kefanatikan dan tidak membelenggu jiwa”<sup>29</sup>

Dalam ruang dialog umat beragama, toleransi merupakan salah satu kekuatan yang harus dijadikan komitmen bersama untuk menciptakan saling memahami dan saling menghargai antara yang satu dengan lainnya secara tulus dan damai, karena dengan toleransi seseorang bisa menahan diri dari tindakan yang tidak menyenangkan pihak lain. Toleransi, merupakan kemampuan seseorang dalam menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan,<sup>30</sup> sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian dalam keragaman.

Toleransi beragama, memiliki makna membiarkan, menghargai, dan membolehkan mereka yang berbeda agama, keyakinan, dan paham keagamaan untuk hidup bersama-sama dalam masyarakat.<sup>31</sup> Toleransi beragama tidak bermakna membuang identitas keagamaan dalam diri umat beragama, untuk kemudian melebur dalam keyakinan dan ritual bersama. Dan tidak pula bermakna

---

<sup>26</sup>Ibid. 13

<sup>27</sup> AS, Hornby, Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, (Oxford: Oxford University Press, 1989), 1350.

<sup>28</sup> Atabik Ali, Kamus Ingris Indonesia Arab, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tt), 1352.

<sup>29</sup> Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan..... 155

<sup>30</sup> Alwi Shihab, Islam Inklusif..... 41

<sup>31</sup> Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia, (Malang: Aditya Media Publishing, 2011), 155.

pembenaran terhadap keyakinan orang lain yang beda keyakinan, sehingga berpotensi terjadinya konversi agama. Kelapangan menerima perbedaan sebagai wujud kemerdekaan seseorang dalam menentukan pilihan jalan hidupnya, merupakan essensi toleransi beragama.

Toleransi beragama tidak ada hubungannya dengan pandangan relativitas kebenaran, melepaskan iman, menghindari kepastian, dan berkehendak bebas, atau meleburkan yang haq dengan yang batil.<sup>32</sup> Keburaman nilai kemanusiaan dalam era globalisasi ini, antara lain karena hilangnya rasa cinta dan sikap toleransi. Sebenarnya dengan toleransi manusia akan mampu memahami keragaman dan perbedaan sikap manusia, baik dari aspek opini, *worldview*, *ideology*, etnisitas maupun keyakinan. Dengan toleransi, sesuatu yang berbeda dapat diletakkan di dalam hati nurani, keyakinan, dan kekuatan emosi. Karena toleransi memiliki makna mencintai keragaman penciptaan dari sang Pencipta,<sup>33</sup> Toleransi bukan bermakna membuka diri untuk dipengaruhi orang lain atau mengikuti apa yang menjadi kemauan orang lain, melainkan memiliki makna menerima mereka seperti apa adanya, dan mengetahui bagaimana cara bersama mereka.

Toleransi didefinisikan pula sebagai sikap menghormati orang lain, belas kasihan, kemurahan hati, atau kesabaran. Dengan demikian toleransi merupakan unsur yang paling penting dari sistem moral dalam kehidupan sosial, yang mengajarkan bagaimana cara merangkul dan mengasihi orang lain tanpa memandang perbedaan pendapat, pandangan dunia, ideology, etnis, maupun keyakinan.<sup>34</sup> Nilai toleransi, terkait erat dengan kerendahan dan kemurahan hati, keramahan, dan kesopanan dalam menghargai orang lain. Seorang yang berjiwa toleran akan selalu melakukan *self-criticism* (kritik diri) atas keterbatasan pemahaman atau pengetahuan dirinya,<sup>35</sup> sehingga ada kesiapan untuk mendialogkan apa yang menjadi perbedaan, baik dalam mencari titik temu maupun dalam merumuskan alternatif kerangka kebersamaan dalam perbedaan. Dengan kesadaran atas keterbatasan tersebut, seorang yang berjiwa toleran akan terhindar dari kesombongan diri yang memandang salah segala hal yang ada di luar pengetahuannya dan hal-hal yang membedainya.

Membicarakan toleransi dalam konteks pluralitas agama tidak dapat dilepaskan dari prespektif teologis dan sosiologis. Karena tidak ada aktivitas manusia yang terlepas dari keyakinan teologisnya, apalagi dalam hubungan antar penganut agama yang berbeda. Dan sebagai fakta sosial, pluralitas agama dan paham keagamaan yang memperoleh respon toleransi dan intoleransi, tidak dapat dilepaskan dari hukum-hukum sosial dan struktur sosial masyarakat.

#### a. Nilai Teologis Toleransi

---

<sup>32</sup> Mahmoud Sadri & Ahmad Sadri (Ed), Abdul Karim Soroush, *Mengugat Otoritas dan Tradisi Agama*, (Bandung, Mizan : 2002), 203

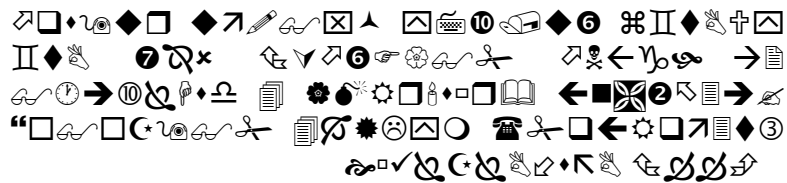
<sup>33</sup> M.Fethullah Gulen, *Toward a Global Civilization of Love and Tolerance*, (New Jersey: Tughra Books, 2009), 46.

<sup>34</sup> Irwan Masduki, *Berislam secara Toleran..*, 153.

<sup>35</sup> *Ibid*, 18.

Bagi umat Islam, ajaran toleransi menjadi spirit al-Qur'an dalam menciptakan kedamaian hidup. Sejak ayat pertama pada surat pertama dalam al-Qur'an (surat al-Fatihah), ditegaskan bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Firman ini dapat dibaca sebagai tuntunan Tuhan agar para hamba-Nya senantiasa menebarkan kasih dan sayang dalam kehidupan sebagai pancaran dari Kasih dan Sayang-Nya yang ditebarkan kepada seluruh ciptaan-Nya. Dengan demikian, sikap toleran dengan basic teologis *tajalli* Rahman-Rahim Allah, merupakan nilai fundamental dalam membangun sikap keberagaman yang harmoni dan damai.<sup>36</sup>

Mengharapkan hanya ada satu agama untuk seluruh umat manusia, merupakan harapan yang *impossibel* yang tidak realistis, walaupun banyak ayat al-Qur'an yang menyerukan kepada seluruh manusia untuk menyembah Allah sebagai satu-satunya kekuatan *absolut* di jagat raya ini, namun secara bersamaan dalam satu kesatuan ayat-ayat al-Qur'an, Allah memberikan petunjuk yang jelas kepada umat manusia tentang tata cara menjalankan kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang pluralistik. Hal ini dapat dipelajari dari firman Allah pada surat Yunus : 99, al-Kahfi : 29, al-Baqarah : 256, dan sejumlah ayat yang lain dalam tebaran Firman Allah dalam al-Qur'an.



Artinya : dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ? (QS. Yunus : 99)

Jaminan kebebasan bagi seseorang dalam menentukan pilihan, akan mengantar kehidupannya menjadi terbuka, dan sekaligus mendidik menjadi pribadi bertanggungjawab, karena logika dari kebebasan adalah tanggungjawab. Seseorang yang merdeka (bebas) dalam hidupnya, ia akan meyakini dan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri atas pilihan dan pertimbangannya sendiri, sehingga secara logis orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sebaliknya seseorang yang melakukan sesuatu dalam keterpaksaan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pilihan keyakinan dan perbuatannya. Pembebanan atau *taklif* dalam menjalankan syari'ah hanya kepada orang-orang yang berkeyakinan, berakal dan dewasa (*baligh*), serta memiliki kemampuan dalam menentukan pilihan (*tamyiz*), menjadi indikasi bahwa seseorang dalam menjalankan ajaran agama harus dalam kondisi bebas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

<sup>36</sup> Zuhairi Misrawi, Al-Qur'an Kitab Toleransi..., 10

Dengan jaminan kebebasan memilih yang dimiliki masing-masing orang, bukan hanya memberikan konsekwensi masing-masing orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri-sendiri, melainkan juga membawa konsekwensi antar individu harus saling menghargai kebebasan yang dimiliki individu-individu yang lain. Masing-masing individu akan dapat menjalankan kebebasannya, ketika kebebasan tersebut terlindungi dari intervensi pihak lain. Sikap saling melindungi, saling menghargai dan saling menghormati kebebasan yang melekat pada masing-masing orang, merupakan inti dari sikap toleransi.

Iman merupakan pengalaman yang sangat personal, seseorang memeluk suatu agama secara individual, sebagaimana menghadapi kematian secara individual pula. Aktivitas ritual bisa saja bersifat komunal, tapi keimanan yang mendasari ritual tetaplah individual. Ekspresi iman bisa bersifat publik, tapi esensi iman bersifat privat dan ghaib. Karena itu iman yang sejati, bergantung pada individualitas dan kebebasan.<sup>37</sup>

Ketulusan menjalankan perintah Tuhan yang menjadi substansi penyembahan terhadap Tuhan, jauh di luar area pemaksaan. Kesadaran iman dan cinta yang berada di atas dunia nalar, merupakan kekuatan batin yang personal dalam merambah jalan menuju Tuhan. Bagi mukmin sejati yang keimanannya dilandasi cinta, bukan surga dan neraka yang menjadi pertimbangan dalam tindakan keagamaannya, melainkan iman dan cinta itu sendiri. Karena itu, para Nabi membangun komunitas beriman-ruhaniah, bukan masyarakat legal-badaniah, berangkat dari keimanan dan hati, menuju pada ritus dan kewajiban. Keimanan yang aktif, bebas dan batin, dapat membentuk manusia beriman, memiliki kerendahan hati dan ketaatan yang tulus, baik secara spritual maupun fisik.<sup>38</sup> Seseorang bisa saja memaksakan pemberlakuan shari'ah dalam suatu komunitas atau bahkan negara, tapi bagaimana dengan keimanan yang harus mendasari pelaksanaan shari'ah. Apabila suatu tindakan tanpa keyakinan, ibarat tubuh tanpa jiwa, eksistensi tanpa esensi.

Sikap intoleransi baik antar umat beragama maupun antar penganut paham keagamaan dalam intern agama yang dapat memicu tindakan kekerasan, selalu terkait dengan kehendak untuk memaksakan pikiran, ideologi, agama dan sebagainya dari satu kelompok pada kelompok yang lain atas dasar klaim kebenaran yang eksklusif, dengan menganggap bahwa pikiran, ideologi, dan agamanya yang paling benar, sementara pikiran, ideologi dan agama yang lain tidak masuk dalam kesadarannya sebagai subjek yang juga memiliki kebenaran. Cara pandang semacam ini, menafikan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan yang merdeka, yang dihargai dan dihormati, serta bertentangan dengan pesan dan visi kemanusiaan yang terkandung dalam semua agama.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Mahmoud Sadri & Ahmad Sadri (Ed), Abdul Karim Soroush ....., 204

<sup>38</sup> Ibid, 205

<sup>39</sup> KH. Husein Muhamad, *Mengaji Pluralisme...* 17-18

Rasulullah SAW pada suatu hari ketika ada delegasi Kristen Najran mendatanginya, Rasulullah SAW menerimanya di masjid. Dan ketika mereka meminta melakukan kebaktian di masjid, beliau menyatakan, biarkanlah mereka melakukan kebaktian di mesjid ini.<sup>40</sup> Fakta ini menunjukkan, bahwa akar toleransi dalam Islam sangat kuat, karena telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW pembawa ajaran Islam, bukan saja membiarkan penganut agama lain menjalankan ibadah di tempat-tempat ibadahnya, bahkan ketika meminta izin menjalankan ibadah di tempat ibadah umat Islam, beliau mengijinkannya.

Nilai toleransi merupakan bagian terpenting dalam visi kemanusiaan yang diajarkan Islam. Pandangan kemanusiaan dalam Islam, adalah cara melihat manusia apapun identitasnya sebagai makhluk yang harus dihormati dan dihargai sebagaimana Tuhan sendiri menghormati dan menghargainya. Pilihan keyakinan tidak menjadi wilayah manusia, melainkan sebagai anugerah, bimbingan dan petunjuk Tuhan, karena itu tidak ada seorangpun yang dapat memaksakan keyakinan kepada pihak lain. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap manusia yang lain, sebatas mempersaksikan keyakinannya, menunjukkan bukti-bukti kebenaran yang diyakininya, dan mengajak untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan, baik dalam tataran individu maupun sosial.

#### b. Nilai Sosiologis Toleransi

Menyikapi pluralitas agama dan paham keagamaan sebagai realitas sosial yang niscaya, kehadiran lembaga dan hukum yang melindungi kesetaraan dan mengembangkan rasa persaudaraan baik atas dasar keimanan, kebangsaan, maupun kemanusiaan, menjadi berarti dan bernilai strategis. Karena tanpa jaminan kesetaraan, dan etika bersama yang dapat mendorong umat manusia melakukan tindakan bersama dalam membangun kemaslahatan hidup, akan dapat memicu tumbuhnya sikap superioritas kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang menghegemoni, dan dapat berujung pada tumbuhnya tindakan diskriminasi dan arogansi mayoritas.

Ada dua masalah utama toleransi yang melingkupi kehidupan umat dalam pergulatan sosial di tengah-tengah masyarakat plural. Pertama, secara internal terjadi reduksi terhadap ajaran toleransi yang diajarkan agama karena kondisi objektif pertarungan politik kekuasaan, baik dalam kekuasaan struktural (negara) maupun kekuasaan kultural. Toleransi menjadi barang langka dalam kehidupan umat, karena tekanan kepentingan kekuasaan yang cenderung menghalalkan segala cara termasuk dengan pandangan eksklusivisme yang senantiasa memandang kelompok lain sebagai kelompok yang salah dan sesat.

Kedua, secara eksternal kondisi ketimpangan sosial turut memicu kelahiran kelompok sosial yang bersikap intoleransi dalam menyikapi berbagai permasalahan bahkan cenderung menggunakan tindakan kekerasan dalam penyelesaian masalah, sehingga melahirkan masalah baru yang

---

<sup>40</sup> Ibn Hisyam, *al-Si>rah al-Nabawiyah* (Beirut: Da>r al Khayr, 2004),II., 164.

semakin kompleks.<sup>41</sup> Gerakan fundamentalisme yang sringkali menggunakan jubah agama dalam melegitimasi tindakan kekerasan dalam melawan kapitalisme, dalam dinamikanya mengarah pada sikap dan tindakan intoleransi terhadap *out-group*, bukan saja yang dinilai liberal melainkan juga terhadap kelompok moderat.

Konflik sosial dalam rentangan panjang perjalanan umat beragama, yang bermuara pada terciptanya perpecahan umat beragama baik internal maupun eksternal, bahkan melahirkan tindak kekerasan atas nama agama dengan menafikan nilai-nilai kemanusiaan yang telah dijunjung tinggi dalam agama, hal tersebut terjadi disamping akibat merosotnya atau terjadinya krisis kewibawaan agama, juga terjadi akibat fakta-fakta sosial dalam kehidupan pluralitas yang tidak terjembatani dengan baik. Ada empat faktor berpengaruh dalam terjadinya konflik sosial yang bersumber dari agama yaitu; perbedaan doktrin dan sikap mental, perbedaan suku dan ras pemeluk agama, perbedaan tingkat kebudayaan, dan masalah mayoritas dan minoritas pemeluk agama.<sup>42</sup>

Fakta sosial menunjukkan bahwa dalam konflik umat beragama, senantiasa melibatkan kelompok-kelompok yang berbeda keyakinan atau iman. Misalnya antara umat Islam dengan umat Kristen, umat Islam dengan umat Yahudi, Umat Kristen dengan umat Yahudi, dan umat lainnya. Dalam konflik tersebut, pada umumnya bersumber dari penilaian terhadap agama sendiri dan agama orang lain, nilai tertinggi selalu diberikan pada agama sendiri dan agama sendiri selalu dijadikan patokan (*refernece group*), sedang agama lain dinilai menurut patokan agama sendiri.<sup>43</sup>

Perbedaan doktrin antar kelompok agama dan keagamaan, yang disertai dengan sikap mental yang rendah sebagai pemeluk agama, misalnya kesombongan religius - karena merasa keyakinannya atau doktrin agamanya paling benar - kemudian kesombongannya diikuti dengan sikap prasangka negatif terhadap doktrin agama lain, sehingga melahirkan sikap intoleransi, melakukan penghinaan terhadap pihak lain, hal-hal tersebut turut menjadi sumber atau pemicu konflik sosial dalam kehidupan pluralitas agama.<sup>44</sup>

Demikian pula Fakta sosial adanya pluralitas suku dan ras dalam kehidupan manusia, pada satu sisi dapat disatukan dengan agama, akan tetapi dalam situasi yang lain perbedaan suku dan ras ketika ditambah dengan adanya perbedaan agama, kondisi tersebut seringkali semakin menjadi pemicu konflik umat beragama. Karena perbedaan suku dan rasa itu sendiri, sering menjadi pemicu konflik, apalagi diikuti dengan perbedaan keyakinan antar suku dan ras tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Qur an Kitab Toleransi*.... 224

<sup>42</sup> D. Hendropuspito OC, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1083), 151.

<sup>43</sup> *Ibid.* 151-152

<sup>44</sup> *Ibid.* 154-155

<sup>45</sup> *Ibid.* 156-157

Hal lain yang sering menjadi pemicu konflik sosial umat beragama adalah; perbedaan tingkat kebudayaan pemeluk agama, yang ditandai dengan tingkat pendidikan dan produktivitasnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Perbedaan kebudayaan tersebut, akan berpengaruh terhadap cara pandang dalam memandang agama di tengah-tengah kehidupannya, apakah agama sebagai *way of life* dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam rekayasa kehidupan, atau justru dijadikan sebagai kerangka hidup yang membatasi diri dari yang dianggap sebagai dunia luar. Perbedaan cara pandang itulah, seringkali turut memicu konflik sosial umat beragama, karena dari perbedaan cara pandang akan memunculkan perbedaan dalam menyerap nilai kebenaran yang berpengaruh pada ekspresi keberagamaannya. Konflik laten antara kelompok tradisionalis, modernis, fundamentalis dan liberalis dalam umat beragama, tidak bisa dilepaskan dari perbedaan tingkat kebudayaan mereka.<sup>46</sup>

Perbedaan kapasitas dan perbedaan pendekatan dalam memahami agama, akan melahirkan pemahaman yang berbeda terhadap agama yang kemudian melahirkan berbagai paham keagamaan dalam intra umat beragama. Pluralitas paham keagamaan ini, juga dapat memicu terjadinya konflik antar penganut paham keagamaan yang dapat saling menyekatkan antar kelompok paham keagamaan.<sup>47</sup>

Mayoritas-minoritas pemeluk agama, sering pula menjadi batu sandung dalam tatanan kehidupan yang harmoni dan damai. Hal tersebut terjadi terutama ketika agama memasuki ruang politik, ada kecenderungan kelompok mayoritas menyepelkan kelompok minoritas agama, bahkan sering terjadi ketidakadilan dalam memperlakukan kelompok minoritas pada berbagai bidang kehidupan. Fakta yang paling mudah didapatkan, dalam suatu lingkungan masyarakat yang heterogin, ketika kelompok minoritas bermaksud mendirikan sarana agama dipersyaratkan untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu dari kelompok mayoritas, sementara kelompok mayoritas tidak pernah berfikir untuk mendapatkan ijin dari kelompok minoritas dalam melakukan aktivitas keagamaannya, mereka (mayoritas) cenderung melakukan apapun yang dikehendaki tanpa berfikir keberadaan kelompok minoritas.<sup>48</sup>

Dalam fenomena mayoritas-minoritas umat beragama, ada hal yang perlu diperhatikan adalah, adanya kecenderungan kaum intelektual golongan mayoritas – yang jumlahnya lebih sedikit dari totalitas komunitas - lebih bersikap toleransi terhadap kelompok minoritas bila dibandingkan dengan sebagian besar umat yang hanya bermodalkan fanatisme buta dalam beragama. Walaupun ada juga dari sebagian kaum intelektual mayoritas yang menduduki kekuasaan baik struktural maupun kultural, melakukan upaya-upaya melumpuhkan minoritas melalui peraturan-peraturan atau kesepakatan-kesepakatan, dan fatwa-fatwa yang tidak adil.

---

<sup>46</sup> Ibid. 159-163

<sup>47</sup> H. Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), 148-149.

<sup>48</sup> D. Hendropuspito OC, *Sosiologi Agama....* 165-166



Keberadaan minoritas dengan segala aktifitasnya, seringkali dipandang sebagai pengganggu stabilitas, meresahkan kehidupan umat beragama, sehingga mereka tidak bebas bergerak dalam menjalankan ajaran agama dan paham keagamaannya. Padahal kalau ditelaah secara mendalam, kehidupan kelompok minoritas itulah yang benar-benar merasakan gangguan dan keresahan yang kongkrit, karena mereka tidak kuasa untuk membebaskan diri dari diktator mayoritas yang menghegimoni hidupnya.<sup>49</sup> Diktator mayoritas dalam umat beragama, cenderung terjadi ketika berhungan dengan ranah agama atau paham keagamaan yang diekspresikan dalam ruang publik. Kehidupan kelompok minoritas di tengah-tengah mayoritas umat agama yang mengekspresikan agama dan paham keagamaannya di ruang privat cenderung tidak mengalami gangguan secara langsung, apalagi keberadaan kaum minoritas dapat memberikan manfaat terhadap kelompok mayoritas dalam berbagai bidang kehidupan lainnya.

Dalam dunia pendidikan, hampir dipastikan kelompok minoritas yang menempuh pendidikan pada suatu lembaga yang dihuni oleh kelompok mayoritas agama, mereka (minoritas) tidak mendapatkan fasilitas guru pendidikan agamanya dan tempat ibadah. Guru pendidikan agama dan tempat ibadah yang disediakan di lembaga tersebut, hanya dari kelompok agama mayoritas. Ketidakadilan perlakuan dalam dunia pendidikan, disadari atau tidak disadari menjadi titik awal pembenihan sikap intoleransi yang dapat berkembang dalam pembentukan jiwa dan perilaku intoleran antar pemeluk agama.

Tuntutan pembumian nilai toleransi, pada dasarnya bukan saja terkait dengan ajaran agama-agama yang memandang manusia dengan fitrah kemerdekaannya, melainkan menjadi tuntutan pula dari realitas kehidupan manusia yang dihadapkan dengan problema yang semakin kompleks. Semakin lebarnya jurang kemiskinan struktural sebagai akibat menguatnya kapitalisme global, ketidakadilan, terorisme global, perilaku korupsi yang semakin menggurita, dan berbagai problema kemanusiaan lainnya, menuntut seluruh umat manusia apapun latarbelakang agamanya untuk bangkit dengan kesucian nuraninya, bergandeng tangan menggarap bersama-sama megaproyek kemanusiaan dalam mewujudkan kehidupan yang harmoni, damai, adil, dan sejahtera. Kalau banyak umat beragama yang masih menggunakan kaca mata buram dalam melihat nilai toleransi dari perspektif teologis, setidaknya fakta sosial keburaman nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan dapat menjadi sumber inspirasi dalam pembumian nilai toleransi.

Dalam pandangan Gulen, sebenarnya toleransi sudah ada didalam spirit masyarakat, hanya dibutuhkan media untuk menyadarkannya kembali.<sup>50</sup> Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan secara terus menerus menyadarkan masyarakat bahwa, walaupun terdapat berbagai perbedaan harus disadari bahwa masing-masing merupakan bagian dari masyarakat

---

<sup>49</sup> Ibid. 167.

<sup>50</sup> Ali Unal dan Alphonse Williams, *Advocate of Dialogue: Fethullah Gulen*, (Virginia: The Fountain, 2000), 206.

dunia, bukan satu-satunya penduduk dunia yang bisa berbuat apa saja menurut keinginannya. Oleh karena toleransi menuntut kesediaan diri untuk melihat pendapat orang lain patut dihormati, maka upaya mencapai sikap toleransi tersebut tidak bisa dipisahkan dari proses perluasan wawasan dan pendidikan inklusif.<sup>51</sup>

Dengan potensi wawasan yang luas, seseorang akan terhindar dari eksklusivisme yang menganggap bahwa hanya dirinya sendiri yang benar sedangkan orang lain salah. Seorang yang berwawasan luas dan inklusif, akan selalu berpandangan bahwa kebenaran tidak dapat dimonopoli oleh suatu kelompok tertentu apalagi oleh seseorang, karena manusia memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyerap kebenaran yang takterbatas. Dengan demikian menjadi logis untuk menghargai pendapat dan keyakinan pihak lain, karena sama-sama memiliki peluang untuk benar, dan dengan keterbatasannya sama-sama memiliki peluang juga untuk salah.

Toleransi bertolak dari nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh semua orang, karena toleransi tumbuh dari sikap kerendahan hati, kemurahan hati, keramahan, dan kesopanan dalam menghadapi orang lain yang berbeda dengan dirinya. Seseorang yang memiliki sikap toleran, akan selalu melakukan kritik diri (*self-criticism*) atas keterbatasan pemahamannya, tidak takut untuk menyatakan tidak tahu bahkan mengakui kebodohnya dalam hal-hal yang memang tidak diketahui atau di luar penguasaannya, dan bersedia menghargai kritik pihak lain terhadap pendapatnya.

Malik bin Anas (Imam Malik) berpendirian bahwa kebebasan berpendapat dan perbedaan harus dihargai, tidak boleh diberangus dengan unifikasi melalui kebijakan penguasa. Pada saat Harun al-Rasyid berinisiatif menggantung al-Muwatta karya Imam Malik di atas Ka'bah dan memerintahkan semua orang agar mengikuti kitab tersebut, Imam Malik menolak ide tersebut dengan menyatakan janganlah gantung kitab itu di atas Ka'bah, karena para sahabat Nabi telah berbeda pendapat.<sup>52</sup>

Pernyataan senada juga dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah, bahwa pernyataan dirinya adalah pendapat yang terbaik, namun apabila ada seseorang yang datang kepadanya dengan membawa pendapat yang lebih baik, maka ia lebih baik darinya.<sup>53</sup> Pandangan inklusif dan sikap toleransi para Imam Mujtahid yang telah melahirkan karya besar dalam bidang fiqh, sejatinya dijadikan pegangan dalam kehidupan pluralitas. Bukan saja produknya yang diikuti – apalagi secara eksklusif – sejatinya pola pikir dan sikapnya dalam menyikapi perbedaan juga diteladani. Sikap *agrimen in disagrimen* dan *unity in deversity* yang dijiwai semangat toleransi, saling

---

<sup>51</sup> Irwan Masduki, *Berislam Secara Toleran...* 18-19.

<sup>52</sup> Muh}ammad Abu> Zahra, Ma>lik Haya>tuwu wa As}ruhu>, Arauhu> wa Fiqhuhu>, (Kairo: Da>r al-Fikr al-Arabi>, 2002), 186-187.

<sup>53</sup> Muh}ammad Abu> Zahrah, Abu> H}ani>fah, Haya>tuwu> wa 'As}ruhu>, Arauhu>, wa Fiqhuhu>, (Kairo: Da>r al Fikr al-'Arabi>, 1997), 56.

menghargai perbedaan dan mengakuinya sebagai keniscayaan merupakan *social capital* dalam mewujudkan perdamaian.

Jaminan dasar atas keselamatan keyakinan agama masing-masing orang, dengan menempatkan agama sebagai wilayah privat dan karenanya tidak dapat dipaksakan, maka dalam pergaulan sosial umat beragama sejatinya dilandaskan pada sikap saling menghormati, yang akan mendorong tumbuhnya sikap tenggang rasa dan saling pengertian dalam keragamannya. Dalam perjalanan panjang sejarah manusia, membuktikan bahwa toleransi yang menjadi bagian inhern dalam kehidupan manusia, mampu menjadi kekuatan dalam melakukan transformasi sosial dalam skala massif. Dalam konteks Islam, melalui ajaran tauhid yang secara inklusif memberikan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan dan perbedaan pendapat, mampu memberikan tawaran dalam melakukan dobrakan moral atas ketidakadilan wawasan hidup jahiliyah yang berwatak menindas.<sup>54</sup>

Sikap hidup toleran dan anti kekerasan, pada dasarnya menjadi ajaran inti dalam setiap agama, namun dalam ranah sosial selalu ada ketegangan antar agama dan paham keagamaan. Hal ini tidak lepas karena keberagaman manusia lebih terbentuk oleh paham keagamaan bukan agama itu sendiri. Dalam tataran sosiologis, masyarakat agama-agama dibentuk oleh paham keagamaan tertentu, dan memungkinkan pada berbagai kawasan terdapat paham keagamaan yang beragam. Bagi kelompok masyarakat yang tidak hidup dalam pluralitas paham keagamaan, bisa jadi paham keagamaan tersebut dianggap sebagai agama itu sendiri, dan konsekwensinya bisa berakibat munculnya klaim kebenaran dan sikap keberagaman yang eksklusif. Suatu kawasan yang terbentuk atau didominasi paham keagamaan tertentu, cenderung memandang paham keagamaan yang lain sebagai penyimpangan, bahkan sebagai paham sesat. Dengan demikian, dalam konteks umat Islam diperlukan untuk melahirkan *fiqh al-tasa>muh* (fikih toleransi), untuk memberikan alternatif pemikiran dalam rangka menyikapi pluralitas paham keagamaan.<sup>55</sup>

Menurut Zuhairi, fikih toleransi sejatinya menyentuh tiga wilayah yaitu; wilayah diskursus keagamaan, wilayah legal formal, dan wilayah basis material. Pertama, pada level diskursus keagamaan perlu dimunculkan kesadaran massif bahwa toleransi, perdamaian dan anti kekerasan merupakan pesan utama agama. Kedua, pada level legal formal perlu diupayakan lahirnya suatu kata sepakat antar umat beragama dalam penegakan toleransi, perdamaian dan anti kekerasan. Dalam sejarah perjalan Islam dapat ditemukan beberpa nota kesepahaman yang terkait dengan penegakan toleransi, antara lain yang paling terkenal : Perjanjian Hudaibiyah, dan Piagam Madinah, yang hal tersebut menunjukkan bahwa toleransi dan perdamaian merupakan pilihan utama dalam penyelesaian umat Islam.

---

<sup>54</sup> Abdurrahman Wahid, *Universalisme Islam Dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam*, dalam Budhy Munawar Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta, Paramadina : 1995), 546-547.

<sup>55</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Qur an Kitab Toleransi*, 225-226

Ketiga, pada level basis material harus disadari bahwa toleransi bukanlah konsep kosong, melainkan sebuah konsep yang meniscayakan keadilan dan kesejahteraan sosial.<sup>56</sup>

Dalam pandangan Ibn Maskawih, masyarakat harus dikembangkan diatas landasan cinta kasih, karena suatu masyarakat yang dikembangkan di atas landasan cinta kasih akan terhindar dari perseteruan klaim kebenaran, toleransi dan kerukunan akan menjadi karakternya, sehingga menjadi masyarakat yang beradab dan bermartabat, karena itulah Ibn Maskawih memandang penting pemikiran yang benar dan kuat tentang ajaran cinta kasih yang bersumber dari Tuhan.<sup>57</sup>

Beberapa langkah penting dan strategis dalam mengembangkan sikap toleransi beragama, ditawarkan Dadang Kahmad sebagai berikut :

- Menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama, tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam agama.
- Melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda.
- Mengubah orientasi pendidikan agama yang menekankan aspek sektoral fiqihyah menjadi pendidikan agama yang berorientasi pada pengembangan aspek universal-robbaniyah.
- Meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlak al-karimah.
- Menghindari jauh-jauh sikap egoisme dalam beragama sehingga mengklaim diri yang paling benar.<sup>58</sup>

Kerukunan umat beragama merupakan *conditio sine qua non*,<sup>59</sup> bukan merupakan tujuan akhir melainkan sebuah sarana yang harus ada untuk mencapai tujuan yang lebih jauh; yaitu situasi aman dan damai. Situasi ini, menjadi kebutuhan seluruh umat manusia apapun agamanya, karena dengan aman dan damai lebih memungkinkan untuk meraih nilai-nilai spiritual dan material yang sama-sama dibutuhkan dalam mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Karena itulah dialog agama-agama dan paham keagamaan yang inovatif dan konstruktif, baik dalam mencari titik temu maupun dalam menggarap proyek kemanusiaan secara bersama-sama, menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan sosial sebagai proses sosial dalam menjembatani jurang keniscayaan perbedaan dalam kehidupan plural.

*Tajalli* kasih sayang Tuhan yang dirasakan semua umat manusia, perlu menjadi kesadaran kolektif yang diekspresikan dengan penebaran kasih sayang antar sesama makhluk Tuhan. Atasnama cintanya pada Tuhan yang telah mencintai seluruh umat manusia, sejatinya sesama manusia dapat saling mencintai, saling menyayangi dan menghargai. Kehidupan kita tidak dapat

---

<sup>56</sup> Ibid, 226-227

<sup>57</sup> Maskawih, Tahdzi>b al-Akhla>q wa Tat}hi>r al-A'raq, (Beiru>t: Da>r Maktabah al-Haya>h : tt), 124.

<sup>58</sup> Dadang Kahmad, Sosiologi Agama... 151-152.

<sup>59</sup> D. Hendropuspito, Sosiologi Agama...170.

mengelak dari kondisi kerukunan kolektif, bukan hanya kerukunan seiman, tapi kerukunan seluruh umat dalam berbagai bingkai imannya. Hal ini karena, Pertama, manusia tidak bisa hidup dalam masyarakat tertutup yang dihuni satu golongan pemeluk agama atau paham keagamaan tertentu, globalisasi kehidupan yang semakin menunjukkan interdependensi manusia, meniscayakan situasi kerukunan antar penghuni planet bumi ini. Kedua, problema kemanusiaan yang disebabkan ketidakadilan sosial, kemiskinan struktural, dan *terrorism*, tidak mungkin bisa diatasi hanya oleh sekelompok agama tertentu, melainkan perlu kebersamaan umat agama-agama dan paham-paham keagamaan yang ada di dalamnya, untuk konsolidasi dari segala kekuatan, baik moral, spiritual maupun material. Dalam menghadapi problema kemanusiaan global yang semakin kompleks, menjadi tantangan bagi semua umat manusia, untuk membuktikan bahwa agama yang diyakininya masih relevan dan memiliki arti untuk kepentingan manusia dan dunianya.<sup>60</sup>

Charles Kimball seornag Guru Besar Studi Agama Universitas Oklahoma dalam bukunya *When Religion Becomes Evil* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia Kala Agama Jadi Bencana oleh Nurhadi dan Izzuddin Wahid, memaparkan akar-akar permasalahan yang menyebabkan konflik-konflik berbau agama, antara lain: Pertama, Klaim kebenaran mutlak. Dalam setiap agama, klaim kebenaran merupakan fondasi yang mendasari keseluruhan struktur agama. Tanpa klaim kebenaran, sulit bagi pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agama secara konsisten. Namun apabila klaim kebenaran diinterpretasi menjadi proposisi yang menuntut pembenaran tunggal dan diperlakukan sebagai doktrin kaku, maka kecenderungan terjadi penyelewengan dalam agama akan muncul dengan mudah, dan hal ini menjadi titik awal kejahatan yang menyertai agama. Klaim kebenaran yang kaku, tidak pernah menyadari bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam menangkap kebenaran agama yang hakiki, yang bersumber dari Yang Maha Benar dan Takterbatas.<sup>61</sup>

Kedua, Kepatuhan Buta. Dalam banyak kasus kemanusiaan yang menyeret kelompok agama - sebagaimana diulas panjang lebar oleh Kimball dalam bukunya *When Religion Becomes Evil* - selalu berhubungan dengan sikap kepatuhan buta pengikut aliran keagamaan terhadap pemimpin kharismatik<sup>62</sup>. Ketika keyakinan agama membatasi ruang intelektual pemeluk agama untuk bergulat dalam pencarian esensi dan eksistensi agama yang dapat membentuk pandangan dunianya, dan ketika pemeluk agama di seting untuk hanya percaya pada pemikiran pemimpinnya secara buta tanpa ruang kritik, maka dalam situasi tersebut, peluang penyelewengan agama sangat terbuka. Dan dalam konteks tersebut kepatuhan pengikut tidak lagi pada Tuhan, melainkan kepada pemimpinnya yang kharismatik dan dianggap memiliki otoritas, sehingga gerak kehidupan dalam kelompok tersebut diwarnai dan ditentukan oleh kapasitas pemimpinnya. Pemberian otoritas

---

<sup>60</sup> Ibid. 171-172.

<sup>61</sup> Charles Kimball, *Kala Agama Jadi Bencana*, terj. Nurhadi dan Izzuddin Wahid (Jakarta: Mizan Publika, 2013), 77-78.

<sup>62</sup> Ibid. 127-173.

yang tinggi terhadap pemimpin yang penuh dengan keterbatasan, memungkinkan agama menjadi kerangka atau bingkai dari kehendak pemimpin yang diapresiasi secara buta, sehingga seringkali terjadi tindak kekerasan dan pengrusakan atasnama agama.

Dialog umat beragama yang menjadi tawaran teologis dalam menyelesaikan masalah, sejatinya dapat dikokohkan menjadi institusi sosial yang dapat merekatkan relasi umat dalam kehidupan sosial yang rukun dan damai, baik antar maupun intern umat beragama.<sup>63</sup> Dialog pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia dalam kehidupan sosialnya, karena keterbatasan yang melekat dalam dirinya menjadikan kehadiran orang lain sebagai mitra dalam menyelesaikan problema kehidupan menjadi penting dan sangat berarti.

Pelaksanaan dialog umat beragama di Indonesia, baik yang diprakarsai pemerintah maupun lembaga-lembaga nonpemerintah, baru sebatas menjembatani jurang perbedaan antar umat beragama, belum mengarah pada upaya membangun kesepahaman, baik terhadap kesatuan sumber kebenaran agama-agama, maupun dalam misi etik agama-agama yang mampu menggerakkan solidaritas kemanusiaan lintas agama. Dialog umat beragama belum memasuki wilayah normatif atau doktrin agama, karena wilayah doktrin dipandang harga mati yang tidak bisa didialogkan.<sup>64</sup> Implikasi kedangkalan dialog umat beragama yang hanya menyentuh aspek empiris-historis agama, melahirkan toleransi umat beragama yang semu, hanya bisa hidup berdampingan secara fisik, dengan tetap diselimuti rasa curiga dan buruk sangka yang tidak membuahkan kedamaian yang sejati.

Dialog teks yang dilandasi dengan teologi inklusif, akan memperluas cakrawala keberagamaan, dan dapat meneguhkan keyakinan pemeluk agama terhadap universalitas nilai-nilai agama yang dianutnya, serta dapat memberikan apresiasi terhadap agama lain yang saling mengokohkan kebenaran dari nilai-nilai dasar yang dikandung di dalam kitab sucinya. Untuk melembagakan dialog teks agama-agama, kehadiran institusi pendidikan yang apresiatif terhadap pluralitas agama dan paham keagamaan, menjadi suatu keniscayaan. Karena pendidikan sebagai institusi sosial, telah membuktikan keberhasilannya dalam mendesain perubahan sosial untuk jangka panjang.<sup>65</sup>

Lembaga pendidikan dapat mengambil peran strategis dalam menghadirkan agama substantif – bukan simbolik – yang dapat mempertemukan esoteris agama-agama, sehingga kehadiran agama dalam ruang publik lebih berorientasi pada dimensi spritual-etik-moral yang bisa lebih berfungsi dalam menyelesaikan permasalahan kemanusiaan. Disfungsi agama dalam membawa kerahmatan bagi alam semesta, bahkan kehadirannya yang menjadi sumber bencana dalam kehidupan sosial, pada dasarnya tidak

---

<sup>63</sup> D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, 172

<sup>64</sup> Masdar Hilmy, *Islam Profetik*, 151-152

<sup>65</sup> *Ibid*, 154-156

bersumber dari agama itu sendiri, melainkan dari pemahaman keagamaan pemeluknya yang eksklusif,<sup>66</sup> sehingga agama dipaksa hadir dalam ruang publik dalam dimensi legal formal, dan karenanya gesekan umat beragama memercikkan api konflik sosial yang berkepanjangan.

Para elite agama – Ulama, Pendeta, dan sejenisnya – merupakan aktor yang turut memberikan warna dalam mengkonstruksi agama di wilayah budaya. Subyektifikasi agama, tidak hanya berimplikasi pada lahirnya multiinterpretasi paham keagamaan yang sejatinya meliputi relativitas paham keagamaan dalam pluralitasnya<sup>67</sup>, melainkan sebagai akibat hirarki sosial yang menempatkan elite agama pada posisi puncak dan dipandang lebih memiliki otoritas dalam mendekati teks-teks suci agama, maka terjadilah hegemoni paham-paham keagamaan yang membelenggu penganutnya, dan celakanya paham keagamaan yang ada dalam wilayah relatif, dimutlakkan oleh para penganutnya, sehingga berimplikasi pada lahirnya konstruksi paham keagamaan yang saling melakukan klaim kebenaran, dan bermuara pada terjadinya konflik sosial berbasis paham keagamaan.

Desakralisasi elite agama di atas paradigma relativisme, atau inklusivisme dan pluralisme, dapat menjadi tawaran solutif untuk memasuki ruang dialog paham keagamaan yang saling menghargai, dan saling mengakui kemungkinan adanya kebenaran di luar paham keagamaan yang dinutnya, sehingga menjadi jalan lapang menuju toleransi antar penganut paham keagamaan. Kesadaran bahwa kemutlakan ada pada wilayah Tuhan, sedang pemaknaan terhadap Tuhan dan ajaran-Nya adalah nisbi, hasil pembacaan yang terbatas (manusia) tidak memungkinkan untuk menangkap kemutlakan yang Takterbatas (Tuhan), merupakan kesadaran fundamental dalam membentuk ruang dialog yang toleran.

Kehadiran lembaga-lembaga keagamaan yang seringkali menjadi menara gading dalam kehidupan umat, sejatinya mengambil posisi netral dalam menyikapi pluralitas paham keagamaan.<sup>68</sup> Lembaga keagamaan yang dikendalikan para elite agama tersebut akan lebih bermakna dalam menjaga kredibilitas agama, bila mampu mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai *esoteris* agama yang *substantif*, bukan bodi agama (*eksoteris*) yang simbolik. Fatwa-fatwa keagamaannya sejatinya mencerminkan kekayaan nuansa keberagaman masyarakat yang plural, yang berimplikasi pada pencerahan umat dalam menangkap perbedaan tafsir atas agama, dan dapat membedakan antara agama dengan tafsir atas agama, karena pada dasarnya realitas agama sebagai kebenaran mutlak, tidak mungkin dapat ditangkap secara sempurna oleh manusia yang tidak pernah sempurna, seperti halnya ketakterbatasan Tuhan tidak akan pernah ditangkap keseluruhannya oleh manusia yang terbatas.

---

<sup>66</sup> Ibid, 183-184

<sup>67</sup> Ibid, 212

<sup>68</sup> Ibid, 219

Lembaga keagamaan, dapat mengambil peran strategis dalam memediasi kesalah pahaman antar penganut agama, dan sekaligus dalam peran gandanya menjadi representasi umat dalam membangun relasi sosial dan dialog agama dengan umat agama lainnya, sehingga kehadirannya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat secara umum, khususnya dalam membangun budaya damai yang terbebaskan dari sikap arogansi dan tindak kekerasan dengan latarbelakang apapun lebih-lebih yang mengatasnamakan agama.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Sekilas tentang Desa Polagan, Pamekasan**

Kepulauan Madura, sebenarnya, sangat identik dengan Agama Islam. Tak jarang sebagian dari kita menganggap bahwa di daerah tersebut hanya tumbuh satu agama. Namun senyatanya, pulau sebelah utara Surabaya ini, juga memiliki masyarakat yang heterogen. Bahkan dalam sejarahnya, kepulauan ini memiliki keterikatan erat dengan kebudayaan kuno Jawa. Pulau Madura, disebutkan oleh para sejarawan, sebagai bagian dari ekspansi kerajaan Jawa. Oleh karenanya, ada banyak agama yang diyakini oleh masyarakat Madura, hingga hari ini. Apakah itu yang dibawa oleh kerajaan Jawa, seperti Islam, Hindu dan Budha, ataupun agama baru yang berekspansi, seperti Konghucu dan Kristen. Keragaman agama tersebut terlihat di salah satunya desa kecil di Pamekasan. Desa tersebut bernama Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.

Di Desa Polagan, Kecamatan Galis, dari sisi ekonomi masyarakat tidak jauh berbeda dengan daerah Madura lainnya. Kebanyakan masyarakatnya sangat bergantung pada hasil pertanian, apakah itu dari tembakau, padi, jagung dan ketan. Selain bertani, ada juga yang bekerja di bidang kerajinan batik Madura. Meskipun, akhir-akhir ini, tidak sebanyak sebelumnya. Di bidang sosial-kemasyarakatan, masyarakat Desa Polagan tergolong sebagai daerah yang masih menjaga tradisi yang ada. Gotong Royong dan kesopanan sangat dijunjung tinggi di desa ini. Pada bidang pendidikan, lembaga pendidikan pondok pesantren dan pendidikan dasar menengah ada di Desa Polagan. Dari hasil pengamatan peneliti, kebanyakan masyarakat polagan lebih banyak menyekolahkan anaknya di pondok pesantren dibandingkan di Sekolah Umum yang disediakan pemerintah.

Data unik, setidaknya yang sangat berkaitan dengan penelitian ini adalah, keberadaan kerukunan umat berbeda agama melalui simbolisasi Vihara Avalokitesvara. **Karena hanya sebagai simbol, maka di desa tersebut juga terdapat masjid yang besar, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya. Simbolisasi Vihara Avalokitesvara ini dijelaskan oleh masyarakat karena menjadi satu-satu Vihara di Madura yang menyediakan sekian banyak sarana ibadah dari pelbagai agama yang ada di Indonesia. Masyarakat sebagaimana peneliti pahami, turut berbangga akan kebersamaan yang dibangun bertahun-tahun ini.**

Vihara Avalokitesvara didirikan pada abad 18 atau sekitar tahun 1800 sebelum Masehi terletak di Dusun Candi, Desa Polagan, Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Madura di atas tanah seluas 3 hektare. Vihara Avalokitesvara atau kelenteng Kwan Im Kiong yang notabene sebagai tempat



ibadah umat Tri Darma, juga terdapat tempat ibadah untuk umat beragama lain, yaitu Pura untuk umat Hindu dan Mushalla untuk umat Islam. Rencananya akan dibangun lagi sebuah gereja untuk umat Nasrani.

Dibandingkan dengan Vihara sendiri, musholla yang ada ada di lingkungan Vihara Avalokisvara Candi Pamekasan, memang tidak terlalu besar. Berukuran hanya 4×4 meter. Akan tetapi, pihak Vihara, menyediakan perlengkapan ibadah di musholla ini. Tempat berwudlu, sajadah, mukena dan tasbih. Jarak musholla dengan Vihara hanya sekitar 10 meter yang terbatas oleh dinding. Lokasi Pura paling dekat dengan Vihara. Ukuran Pura lebih kecil dari musholla, yakni hanya 3×3 meter. Pembangunan Pura sendiri, sebenarnya atas prakarsa Kapolwil Madura saat itu, yang berasal dari Bali dan menganut Agama Hindu yang menyarankan membangun Pura. Vihara Avalokistesvara merupakan sebuah vihara terunik, karena di dalamnya terdapat bangunan Musholla dan Pura. Hal ini merupakan sebuah simbol kerukunan umat beragama yang penganutnya hidup rukun dan berdampingan.

## 2. Pluralisme Sosial-Keagamaan Masyarakat Desa Polagan, Pamekasan

Dalam analisa peneliti bersumber pada teori dan data yang ada, tipologi yang pantas untuk mendeskripsikan karakteristik cara pandang masyarakat Desa Polagan, Kec. Galis Pamekasan adalah pluralisme sosial-keagamaan. Alasannya sederhana, keragaman agama yang ada di Desa Polagan, merupakan bagian dari sejarah desa yang susah untuk dirubah. Agama terlahir dari *dialektical-tension* antara pemahaman masyarakat waktu itu dengan ajaran agama yang ada. Kebetulan, agama Budha adalah agama yang pertama kali hadir di sekitar Desa Polagan. Oleh sebab itulah, tugas utama yang bisa dilakukan, sebagaimana penjelasan Juru Kunci Vihara, adalah merangkul semua agama, meskipun secara kesejarahan agama Budha lebih awal lahir di desa tersebut. Dengan artifak penemuan patung/arca Dewa-Dewa yang ‘disembah’ oleh umat Budha.<sup>69</sup>

Hal senada diungkapkan oleh KH. Fadeli, salah satu pengasuh Pondok Pesantren di Desa Polagan. Menurutnya, keberadaan agama di dunia ini sudah ditentukan dalam zaman azali. Di dalam Islam dilarang memaksakan kehendak, termasuk memaksakan agama Islam, walaupun harus diyakini bahwa Islam agama yang benar. Bahkan, dalam sejarah, Nabi Muhammad sendiri tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada kerabat terdekatnya. Hal yang dicontohkan Nabi Muhammad adalah berusaha bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda pandangan tersebut. Menunjukkan bahwa agama Islam sebagai agama yang bisa menerima perbedaan, merangkul mereka yang tidak sama, dan masalah keyakinan dipasrahkan kepada individu masing-masing.<sup>70</sup>

Dari sisi struktural, Kepala Desa Polagan, mengamini apa yang sudah menjadi budaya masyarakat di sekitarnya. Baginya, keberadaan desa yang beragam harus dikelola dengan cara yang berbeda pula. Sehingga, perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan desa. Berbeda dengan respon sebelumnya, Kepala Desa Polagan, menganggap bahwa keragaman yang terjalin secara guyup dan

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan penjaga Vihara

<sup>70</sup>

rukun bisa dijadikan potensi desa. “buktnya, sekarang kan menjadi bagian dari pariwisata kabupaten, itu bisa menjadi kekuatan desa”.<sup>71</sup> Ungkapnya kepada peneliti.

Kepada KH. Fadeli peneliti menambahkan pertanyaan, bagaimanakah respon umat Islam sebagai penganut agama mayoritas yang ada di Desa Polagan. Dia menyebutkan bahwa “selama ini, biasa-biasa aja. Masyarakat sudah sangat memahami perbedaan ini sudah ada sejak lama. Tidak perlu untuk dipersoalkan. Malah, sekarang kan, kita bisa lihat sendiri bagaimana Vihara itu, kalau anda menganggap itu sebagai bagian dari persoalan, mempersiapkan bangunan-bangunan buat agama lain. Yang terpenting kan mereka bisa menghormati agama kita, kita akan menghormati apa yang mereka yakini...” tegasnya.<sup>72</sup>

Melalui respon-respon inilah, maka peneliti beranggapan bahwa pluralisme agama sebenarnya adalah *esential values* yang dipegang teguh oleh umat Islam di Indonesia. Di Desa Polagan ini menunjukkan bahwa keragaman agama hadir bukan karena kehendak sosial yang disengaja, melainkan bagian dari ketentuan yang hadir sebagai bunga skenario Tuhan yang maha kuasa. Kondisi ini juga menghadirkan proses generalisasi terhadap sejarah kuat bangsa Indonesia yang dibangun berasaskan pada Bhinneka Tunggal Eka. Sejarah agama Indonesia, bukan dimulai dari agama Islam semata. Sejarah Indonesia melalui keragaman agama Nusantara, apakah itu Hindu, Budha, ataupun agama-agama lainnya.

Oleh karena itulah, dalam upaya menumbuhkan sikap pluralis masyarakat Indonesia, dari semua golongan umat beragama bisa dimulai dari upaya pengkajian kesejarahan, sehingga menciptakan kesadaran historis di setiap individu masyarakat Indonesia. Dengan bahasa sederhana, dikala terjadi konflik keberagaman di Indonesia, masyarakat Indonesia akan menemukan identitas keragamannya dengan cara mengingat bagaimana para pendiri bangsa berdebat, berdiskusi, dan berperang untuk mewujudkan negara kesatuan Indonesia.

Dalam tataran teoritik disebutkan, melalui sikap pluralis, maka masyarakat akan sangat terbuka akan perbedaan. Perbedaan keyakinan keagamaan, agama, budaya, dan semacamnya hanyalah bagian dari dinamika kehidupan yang ditakdirkan. Upaya manusiawi (sosial) adalah merangkai perbedaan menjadi kekuatan, nilai lebih, dan nilai positif lainnya untuk menumbuhkan sikap guyup dan rukun di masyarakat. Model paradigma inilah yang sedang dikembangkan di Desa Polagan; yakni bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut dibingkai menjadi satu kesatuan.

Hal yang unik, dan mungkin saja masih *debatable* di kalangan umat Islam-Indonesia, adalah terjalannya pernikahan beda agama. Hilangnya batasan keagaman di Desa Polagan ini menjadikan masyarakat tidak segan-segan untuk menikahi mereka yang berbeda agama. Salah satu nara sumber penelitian ini menyebutkan bahwa, kalau secara sosial bisa berbaur dan melebur, apa salahnya

---

71

72

kalau dalam kehidupan keluarga juga bisa dirangkai menjadi satu. Bahkan, beberapa data yang peneliti dapatkan, para pekerja di Vihara memiliki hubungan beda agama; yakni perkawinan antara Islam-Budha, Budha-Kristen, dan lain sebagainya.

Secara umum, peneliti pun harus akui, fenomena ini memang bukanlah hal yang tabu. Meskipun, perkawinan beda agama, apabila digeneralisasi akan menjadi polemik tersebut di kalangan umat Islam. Pasalnya, masih ada batasan-batasan paradigmatis dalam memahami pluralisme agama. Semisal, pandangan yang membatasi pluralisme agama hanya di bidang kemanusiaan dan sosial semata. Tidak bisa pluralisme dibawa ke ranah keyakinan yang tidak terbatas. Pluralisme kemanusiaan bisa dikongkritkan sebagai tindakan saling tolong menolong antar manusia, tanpa harus mempertimbangkan latar belakang agama yang ditolong. Sama halnya di bidang sosial-ekonomi, sikap pluralisme berdasarkan paradigma ini dibatasi semata-mata untuk menjalin kerukunan umat beragama, berhubungan bisnis, dan aspek kehidupan sosial lainnya.

### 3. Konstruksi Nilai Toleransi di Desa Polagan, Pamekasan

Sebelum membahas bagaimana proses konstruksi (rancang bangun) sikap toleransi bisa memiliki dampak terhadap pola hidup masyarakat Desa Polagan, Pamekasan, peneliti ingin mengungkapkan bahwa sikap toleran bermakna tindakan menerima, menghormati, menghargai, dan tanpa harus mempersoalkan agama manakah yang paling benar diantara agama yang lainnya. Sikap toleransi hadir dari karakter cara pandang pluralis (dimana perbedaan tidak perlu di'apa'kan). Jadi, hal yang bisa dilakukan adalah menguatkan bahwa semua agama memiliki kebenaran sebagaimana yang dipersepsikan oleh masing-masing pengikut agama. Bukan, pendefinisian kebenaran yang diungkapkan oleh agama lain.

Melalui cara pandang yang demikian, membangun sikap toleran sebagai identitas bersama merupakan hal yang mudah dan akan diikuti oleh masyarakat secara luas melalui proses pilihan yang rasional. Dari hasil analisa peneliti, beberapa fase berikut bisa menjadi pijakan bersama untuk membangun sikap toleran, belajar dari apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Polagan, Pamekasan, Madura:

#### a. Nilai Historis Sikap Toleransi

Salah satu kekuatan bangsa Indonesia, sebenarnya, adalah nilai kesejarahan berdirinya bangsa yang dibentuk melalui pelbagai suku, agama, ras, adat, dan bahasa. Dalam bahasa sederhana, kemajemukan aspek kehidupan masyarakatnya. Hanya saja, arus globalisasi menghilangkan identitas kebangsaan yang multikultural ini sedikit demi sedikit. Apakah itu dimulai dari sisi nasionalisme, patriotisme, bahkan ideologi kebangsaan. Arus globalisasi – dari seluruh aspek yang diserang – menjadi hantu yang sulit diantisipasi oleh negara manapun. Sehingga, tak jarang, masyarakat Indonesia mulai melupakan nilai-nilai kebudayaan lokal, berubah menggunakan paradigma global.

Keberadaan Desa Polagan yang jauh dari hantaman informasi dan hantu globalisasi, akhirnya, membuat mereka bisa menjaga jati diri mereka

sebagai desa yang plural, sebagai desa yang ditetesi anugerah perbedaan yang diciptakan Tuhan. Imbasnya, sejarah mereka secara turun temurun terus diceritakan sebagai desa toleran. Inilah yang diungkapkan oleh Juru Kunci Vihara bahwa upaya untuk menjaga kerukunan umat beragama adalah wasiat dari para leluhurnya. Hingga dirinya sebagai keturunan ke-sekian. Begitu halnya dengan umat Islam yang ada. Para tokoh agama Islam di sekitar desa ini secara intensif menderivasi ide toleran ini kepada para generasi muda. Sehingga, batasan perbedaan agama menjadi hilang.

Kolaborasi para tokoh agama untuk menceritakan keunggulan sejarah ini, bisa menjadi benteng bagi seluruh masyarakat yang ada di Desa Polagan, Pamekasan. Sebuah benteng yang kokoh yang tidak bisa dihantam oleh paradigma global manapun. Dengan demikian, peneliti pun beranggapan bahwa untuk menumbuhkan sikap toleran di Indonesia, semestinya, harus ada usaha masif dari pemerintah untuk mengaktualisasikan sejarah sikap para pendiri bangsa membangun bangsa Indonesia. Sehingga bisa menghadirkan identitas endemik yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, serta membekas dari generasi.

Reaktualisasi nilai kesejarahan Indonesia sebagai negara majemuk, hari ini, harus diakui sedang dalam kerentanan. Ada banyak pembalikan sejarah Indonesia sebagai negara kesatuan dan berideologi Pancasila, menjadi negara yang dibangun oleh salah satu agama semata. Alasan mereka yang mengkampanyekan tersebut, karena mayoritas agama yang ada di Indonesia hanya satu agama. Pengkaburan kesejarahan ini, dapat merubah paradigma pluralis yang ada di Indonesia.

Jadi, kekuatan utama yang dapat mengkonstruksi masyarakat bisa menjadi toleran dalam kehidupan beragama adalah melalui reaktualisasi kesejarahan lokal; apakah itu secara heterogen semenjak awal desa, ataupun sejarah setelahnya. Secara garis besar, peneliti menganggap, tak satupun daerah di Indonesia yang dibangun hanya oleh satu agama tertentu. Semua daerah di Indonesia, ada dan berkembang berdampingan dan bersama-sama agama yang lain.

#### b. Tauladan Tokoh Masyarakat

Selain aspek kekuatan kesejarahan, ada ketauladanan tokoh yang menunjukkan sikap toleran. Diakui atau tidak, konflik keberagaman di Indonesia muncul dan berkembang luas diakibatkan oleh seruan para tokoh agama tertentu, apakah itu secara individu ataupun institusional. Relasi *patron-klien* di Indonesia masih sangat kuat, lebih-lebih di bidang agama. Meskipun, tidak juga bisa dipungkiri ada faktor lainnya, seperti instabilitas sosial, kesejahteraan masyarakat, dan aspek-aspek lainnya.

Ketauladanan tokoh di Desa Polagan, Pamekasan terwujud melalui pertemuan-pertemuan yang intensif di beberapa tempat simbol keagamaan, entah itu di Masjid, Pesantren, Gereja, Vihara dan Pure. Kegiatan tersebut ditunjukkan untuk membentuk kesadaran bersama bahwa perbedaan-perbedaan di antara para tokoh masyarakat tidak menjadikan mereka bermusuhan, melainkan bisa berkolaborasi untuk membangun kerukunan di

antara umat beragama. Bahkan, klaim dari beberapa tokoh masyarakat menyebutkan bahwa mereka mengundang orang-orang yang berbeda agama untuk mengamati, mengetahui, dan melihat bagaimana agama lain melaksanakan peribadatan.

Dari sini, sebenarnya, tidak ada yang istimewa dari apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Polagan, Pamekasan. Pemandangan demikian bisa terlihat di beberapa tempat di Indonesia. Namun, wujud kesadaran masyarakat akan pencontohan yang ditunjukkan oleh pemuka agama dianggap sebagai hal yang menyimpang. Malahan, dipersepsikan sebagai penodaan terhadap agama tertentu. Pendiskursian ulang dari persepektif yang beragam ini, menimbulkan gejolak yang di masyarakat secara luas. Tapi, pendiskursian ulang tidak terjadi di Desa Polagan, Pamekasan. Percontohan itu seolah-olah menjadi diskursus yang seragam dari semua orang. Tidak ada alternatif lain yang ditawarkan sehingga masyarakat tidak merasa ambigu terhadap apa yang dilakukan oleh tokoh masyarakat di Desa Polagan.

Keseragaman cara berfikir tokoh masyarakat yang tertular terhadap masyarakat menjadi polarisasi inti untuk membangun sikap toleran masyarakat. Tanpa ada konektifitas pola pikir, maka disharmoni akan selalu hadir di dalam kehidupan masyarakat beragama. Disharmoni ini, bisa saja ditanggulangi, dengan cara melakukan kampanye bersama-sama yang lebih aktif dibandingkan bersikap pasif. Sebagaimana diungkapkan Gus Dur di dalam sebuah seminar tentang toleransi. Sikap toleran tokoh agama di Indonesia masih cenderung pasif. Dalam artian, mereka hanya mampu hadir dikala ada perayaan atau konflik keberagamaan yang menerpa masyarakat tertentu. Para tokoh agama tidak pernah hadir dikala gejolak konflik akan tumbuh. Mereka cenderung diam menunggu hingga meluapnya konflik.

Tak ayal, ketauladanan para tokoh agama seringkali dimaknai hanya sebagai tidak formalitas-strutural, bukan habitus normal-kultural yang mengakar pada setiap individu yang ada di setiap individu tokoh tersebut. Fethullah Gulen dan beberapa tokoh toleran Islam lainnya, menyebutkan bahwa sikap toleran harus hadir dari keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tanpa harus menghiraukan apa yang akan dipersepsikan orang lain. Dengan demikian, hidup dalam harmoni akan menjadi kenyataan dan kesadaran seluruh umat Islam di dunia. Bukan hanya menjadi diskursi yang terus dicarikan cara-cara pengembangan tindakannya.

Ketauladanan para tokoh masyarakat yang dilakukan secara intensif, dalam konstruk teori pilihan rasional, akan menjadi norma sosial yang mengikat. James S. Coleman mengatakan bahwa norma sosial berasal dan bermuara dari tindakan individu yang diulang-ulang, kemudian diikuti oleh orang lain, sehingga menjadi tindakan korporat yang mempengaruhi siapapun yang ada di lingkungan mereka. Berdasarkan logika ini maka, peneliti berkeyakinan bahwa ketauladanan para tokoh masyarakat bertoleransi akan membentuk norma sendiri apabila dilakukan secara intensif.

Persoalan pendefinisian tindakan rasional tersebut, hanya merupakan diskursus tambahan yang bisa dilakukan sebagai *inforcement* (penguatan) dari apa yang dilihat masyarakat secara luas.

c. Institusionalisasi Toleransi

Kalau penjelasan di atas berhubungan erat dengan kegiatan-kegiatan kultural yang dilakukan masyarakat dan tokoh semua agama. Maka apa yang akan dijelaskan bertikut ini adalah dimensi struktural yang ada di daerah:

1) Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), bisa dikatakan, sebagai organisasi taktis yang dimiliki pemerintah untuk menyerukan kerukunan antar umat beragama. Biasanya, secara komposisional, organisasi ini berisikan pemuka agama dari seluruh agama yang berkembang di Indonesia. Program-program utama yang dicanangkan FKUB adalah melakukan dialog antar agama, sosialisasi pentingnya hidup rukun di dalam kehidupan bermasyarakat, dan mencari solusi konstruktif apabila terdapat persoalan (baca; konflik) di masyarakat yang berhubungan dengan agama.

Sebagaimana pemaparan beberapa tokoh agama di Desa Polagan, Pamekasan Madura, peranan FKUB Pamekasan sangat urgen untuk menguatkan sistem nilai yang ada di daerahnya. Salah seorang nara sumber dari agama Hindu mengatakan bahwa di desanya hampir setiap bulan ada pertemuan rutin yang dilakukan untuk mendiskusikan sistem kerukunan yang ada di Desa Polagan. Bahkan, dia mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan lebih inten dibandingkan pengurus FKUB Kabupaten Pamekasan.

Pertemuan-pertemuan tersebut secara tidak langsung mengikis beberapa persoalan kerukunan umat beragama yang ada. Jadi, dalam bahasa lain, mereka selalu mengupayakan strategi preventif dibandingkan harus menyelesaikan konflik setelah meluas di dalam masyarakat. Selain itu, peran pentingnya perkumpulan struktural ini, secara proporsional, bisa melibatkan seluruh elemen yang ada di masyarakat yang beragama. Hal ini berbeda apabila pemuka agama saja yang berkumpul secara personal. Secara eksplisit mereka tidak akan bisa melibatkan struktur-struktur organisatoris yang ada di Desa Polagan.

Salah satu contoh produk penting program kerja FKUB Desa Polagan adalah melobi perangkat desa dan aparatur negara lainnya, agar memperbolehkan masyarakat untuk melakukan pernikahan beda agama. Meski ini bukan bagian dari konstruk kerukunan umat beragama, tapi peneliti tertarik untuk menjadikan contoh kongkret peran FKUB. Pasalnya, sebagaimana diketahui, konteks perkawinan beda agama masih menjadi polemik di Indonesia, apakah itu dari sisi *legal standing* (UU) pernikahan, lebih-lebih dari sisi perdebatan ajaran agama.

Tanpa proses diskusi yang intensif, serta kesadaran akan keragaman yang kuat, hal yang tabu ini, sangat dimungkinkan akan

menjadi polemik kemasyarakatan yang tidak bisa diselesaikan secara mudah. Paparan kepala Vihara kepada peneliti menyebutkan bahwa pernikahan beda agama di Desa Polagan, Pamekasan ini sudah dipertimbangkan dari seluruh aspek yang ada. Tanpa adanya kesadaran bersama untuk menerima perbedaan ajaran, pastilah mereka tidak akan pernah mengizinkan pernikahan ini. Tapi, umumnya, orang yang menikah itu tidak bisa dikekang karena ajaran keagamaan. Mereka sudah terlanjur suka sama suka.

Dengan demikian, peran FKUB dan pemerintah menjadi kunci penting pertama untuk mengkonstruksi kerukunan umat beragama. Bantuan moril, aturan, dan perangkat legal lainnya, maka kerukunan umat beragama tidak akan pernah terjalin. Misalnya saja, dari perangkat desa setempat tidak memberikan izin bagi masyarakat polagan untuk menikahi laki-laki atau perempuan yang berbeda agama. Maka, kemungkinan terbesar adalah konflik akan terus menerus terjadi di daerah tersebut. Karena, sebagaimana dipaparkan sebelumnya, pernikahan berlandaskan rasa cinta dan suka bukan bagian dari aspek keagamaan.

## 2) Tolerance Exhibition (Pameran Toleransi)

Semenjak Vihara Avalokitesvara didirikan, direnovasi, hingga sekarang dikembangkan menjadi salah satu objek wisata-religi di Desa Polagan, Pamekasan Madura. Ada terma yang terbesit dan melekat di dalam otak peneliti, yakni; inilah ruang, tempat, dan sarana masyarakat untuk memamerkan toleransi beragama. Pameran ini, tampaknya, bukan merupakan sesuatu yang tidak disengaja, atau berjalan secara natural, tapi keberadaan Vihara ini dijadikan alat instrumental untuk menunjukkan kerukunan masyarakat Desa Polagan, Pamekasan Madura.

Selama proses penelitian ini berlangsung, peneliti melihat bagaimana orang-orang Budhi Dharma mempersiapkan perangkat Sholat orang Islam, semisal; mencuci sejadah, memperbaiki kran, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, mereka secara langsung bisa melihat orang yang berbeda agama beribadah. Mereka – para pengunjung ataupun masyarakat sekitar – menyapa, berbicara, bercanda, tanpa ada batasan dan pertimbangan apapun. Mereka bersenda gurau seakan-akan tidak ada konflik agama yang terjadi dalam kurun kesejarahan agama-agama.

Pameran sikap bertoleransi ini, selain bisa dilihat orang desa, juga dapat menguatkan kepribadian para anak kecil yang tumbuh dan besar di desa yang penuh dengan kerukunan ini. Anak-anak kecil tersebut, secara tidak sadar, mereduksikan pengalaman kerukunan beragama. Suatu saat, dikala mereka dewasa, pengalaman kehidupan ini akan menjadi fondasi yang sulit untuk dirubah. Pasalnya, pembelajaran melalui pengalaman lebih kuat dampaknya dibandingkan dengan penyerapan secara kognitif.

Secara implikasi teoritik, pameran bertoleransi ini bisa dijadikan sebagai *role model* pengembangan masyarakat toleran. Dalam konteks Islam-Indonesia, sejujurnya, pengimplimentasian teoritik tersebut tidaklah sulit. Pasalnya, mayoritas tokoh agama-agama di Indonesi memiliki sikap

toleran yang kuat. Hanya saja, kampanye sikap toleran para tokoh agama dilakukan di ruang-ruang tertutup. Yang lebih banyak tampak di masyarakat adalah kampanye kelompok-kelompok fundamentalis dan radikal, dibandingkan mereka yang toleran, mereka lebih memilih untuk menjadi *silent majority*.

Kalau saja mau mencontoh apa yang terjadi di Desa Polagan, Pamekasan, pameran toleransi juga disimbolisasi melalui Vihara yang berisikan semua tempat peribadahan agama-agama. Hal yang cukup jarang dilihat di beberapa tempat ibadah agama lainnya. Kendati demikian, yang mungkin ditiru secara implementatif, adalah bagaimana para pemuka agama bisa berkumpul untuk merumuskan aturan yang mengikat masyarakat agar bersikap toleran.

#### **D. Penutup**

Melalui analisa dan pendekatan yang demikian, maka faktor teladan tokoh masyarakat, akar kebudayaan dan sejarah yang hadir menjadi bagian dari sebuah desa, dan sistem institusionalisasi yang sangat mendukung, akan menjadi penentu proses internalisasi nilai-nilai keberagaman agama. Tanpa, harus menanggalkan identitas pemahaman yang dipegang oleh umat beragama yang berbeda-beda, semanjak lama. Pasaunya, keberadaan manusia merupakan produk keyakinan akan keberagaman budaya dan agama yang ada di Indonesia.